



LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH

# (LKjIP) 2017 KABUPATEN PATI



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
2018



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
INSPEKTORAT**

Jalan Setyabudi No. 34 A Telp. (0295) 381842 Pati - Kode Pos 59115

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pati.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pati, 27 Februari 2018

Inspektur Kabupaten Pati



*[Handwritten Signature]*  
Drs. SUMARSONO HADI, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610109 198403 1 006

## KATA PENGANTAR

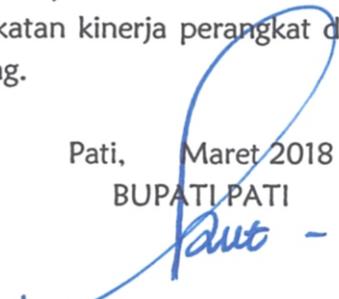


Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas sebagai Kepala Daerah periode 2012-2017. Banyak hal yang telah kami lakukan untuk mewujudkan janji-janji politik kami sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2012-2017. Kami telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pati. Namun demikian masih ada beberapa hal yang belum terwujud sesuai keinginan masyarakat. Kami akan berusaha memperbaiki kekurangan dan kelemahan kami seiring dengan terpilihnya kembali untuk memimpin Kabupaten Pati periode kedua ini. Semoga dengan pertolongan Alloh SWT kami dapat mewujudkan harapan masyarakat yang pada periode lalu belum terpenuhi. Oleh karena itu, dengan semboyan "GUYUP RUKUN NOTO PROJO MBANGUN DESA", visi dan misi kami yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang prima dapat terwujud.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat atas kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap digambarkan perbandingan antara perencanaan dengan hasil yang dicapai (kinerja). Dokumen LKjIP ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kami menyadari bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada kami, masih ada target-target kinerja yang telah ditetapkan belum bisa dicapai 100 %. Dengan menggunakan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, kami akan berusaha secara maksimal agar ketidaktercapaian target-target dimaksud dapat diwujudkan pada periode kedua ini.

Akhirnya, Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Pati di masa mendatang.

Pati, Maret 2018  
BUPATI PATI

  
HARYANTO, SH, MM, M.Si

## DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pemerintahan.....	1
1.2 Kepegawaian .....	2
1.3 Kondisi Geografis dan Iklim Daerah .....	2
1.4 Gambaran Umum Demografi.....	3
1.5 Sistematika .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Prioritas Pembangunan Daerah .....	6
2.2 Indikator Kinerja.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja.....	10
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2017 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	18
3.2.1 Meningkatkan Kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata .....	19
3.2.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas.....	27
3.2.3 Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan Anak.....	36
3.2.4 Meningkatkan fasilitas dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM Dan UMKM untuk mendorong daya saing daerah .....	39
3.2.5 Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan Mendukung ketahanan pangan .....	42
3.2.6 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah.....	48
3.2.7 Meningkatkan peran pengusaha dan investor dalam kerjasama investasi .....	56
3.2.8 Meningkatkan kreatifitas keterampilan, kewirausahaan pemuda, Perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan Serta penanggulangan kemiskinan .....	59
3.3 Realisasi Anggaran.....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b></b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman:
1.1	Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2011-2016	4
1.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati 2012-2016	4
2.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	7
2.2	Pebaikan Atas Sasaran Strategis	9
2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	9
2.4	Matrik Program Kegiatan Dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pati 2017	11
2.5	Target Belanja Daerah	14
2.6	Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2017	15
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	16
3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017	17
3.3	Capaian Indikator Sasaran Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	19
3.4	Kondisi Sekolah di Kabupaten Pati	20
3.5	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	21
3.6	Capaian Indikator Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	22
3.7	Angka Kelulusan	22
3.8	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018	23
3.9	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017	23
3.10	Perbandingan Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	24
3.11	Capaian Indikator Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	25
3.12	Perbandingan Indikator Kinerja Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	26
3.13	Jumlah Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Pati 2016	26

Tabel	Judul	Halaman:
3.14	Capaian Indikator Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan Balita Gizi Buruk	27
3.15	Perbandingan Capaian Indikator Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan Balita Gizi Buruk	29
3.16	Capaian Indikator Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	31
3.17	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	32
3.18	Capaian Indikator Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	33
3.19	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	35
3.20	Capaian Indikator Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	37
3.21	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	38
3.22	Capaian Indikator Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM	40
3.23	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMK	41
3.24	Capaian Indikator Meningkatnya produksi pertanian	42
3.25	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya produksi pertanian	44
3.26	Perbandingan Produksi dan Produktivitas Mulai Tahun 2014	44
3.27	Capaian Indikator Meningkatnya produksi perikanan	45
3.28	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya produksi perikanan	47
3.29	Volume dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2014–2017	47
3.30	Capaian Indikator Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	49
3.31	Jalan Kabupaten Pati Kondisi s/d Bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2017	49
3.32	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	50
3.33	Capaian Indikator Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	50
3.34	Capaian Kinerja Layanan Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2017 Di Kabupaten Pati	51

Tabel	Judul	Halaman:
3.35	Pebandingan Capaian Indikator Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi	51
3.36	Capaian Indikator Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air	52
3.37	Luas Saluran Irigasi yang ada di Kabupaten Pati	52
3.38	Perbandingan Indikator Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air	53
3.39	Capaian Indikator Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	54
3.40	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Pati 2016	54
3.41	Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati	54
3.42	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	55
3.43	Capaian Sasaran Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi	56
3.44	Data PMDN dan PMA Kabupaten Pati Tahun 2017	56
3.45	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi	57
3.46	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	59
3.47	Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	61
3.48	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja	62
3.49	Target Belanja Daerah APBD Perubahan	62
3.50	Ringkasan laporan realisasi anggaran per sasaran Pemerintahan daerah tahun anggaran 2017	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman:
1.1	Peta Kedudukan Kabupaten Pati dalam Kancah Regional Provinsi Jawa Tenga	3
3.1	Penyerahan Mobil Perpustakaan Keliling di serahkan langsung Djoko Ujjianto yang di dampingi Bupati Pati Haryanto di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat	26
3.4	Aplikasi simyandu	58

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman:
1.1	Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan	2
3.1	Capaian Kinerja Kabupaten Pati Tahun 2017	18
3.2	Penyebab Kematian Ibu 2017	28
3.3	Penyebab Kematian Bayi 2017	28
3.4	Desa siaga menurut strata di Kabupaten Pati	34
3.5	Posyandu Menurut Strata di Kabupaten Pati	35
3.6	Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja UMKM sesuai kriteria yang tercantum pada UU no 20 Tahun 2008 Kabupaten Pati Periode Triwulan III tahun 2017	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman:
I	Penetapan Kinerja 2017	63

## BAB I PENDAHULUAN

**T**ata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

### 1.1 PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Pati terdiri dari 7.518 RT, 1.478 RW, dan 406 Desa/Kelurahan. Terakhir pada tahun 2006 ada pemekaran desa di Kecamatan Gabus yaitu Desa Pantirejo, yang dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Pantirejo dan Desa Kosekan. Tahun 2013 jumlah RT sebanyak 7.551 RT, Tahun 2014 sebanyak 7.518 RT, dan pada Tahun 2015 sampai sekarang jumlahnya tetap 7.518 RT.

Pemerintah Kabupaten Pati telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pati telah mengalami perubahan untuk tahun 2017 Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan struktur organisasi di Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati

Pati Nomor 39-64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 21 Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Pemilu legislatif tahun 2014 menghasilkan Anggota DPRD Kabupaten Pati 2014-2019 menurut keanggotaan Partai Politik sebanyak 50 orang. Didominasi oleh PDI-P dan Partai Gerindra yang menyumbangkan anggotanya sebanyak 8 orang atau 16 persen dari total anggota DPRD Kabupaten Pati. Jumlah terbanyak kedua ditempati oleh Partai Demokrat, Partai Golkar dan PKB dengan jumlah anggotanya 6 orang. Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh PKS dengan jumlah anggota 5 orang.

Tahun 2017 diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati dengan hasil akhir rekapitulasi suara secara menyeluruh menunjukkan pasangan calon (Paslon) Haryanto-Saiful Arifin (Harfin), keluar sebagai pemenang Pilkada di Bumi Mina Tani. Paslon tunggal yang diusung oleh delapan partai itu mendapat 519.675 suara, dari total 697.437 suara sah, dalam gelaran pilkada kali ini suara tak sah yang ada mencapai 14.984 sehingga total suara sah dan tidak sah, mencapai 712.421 suara. Jika dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pati yang mencapai 1.034.256, maka tingkat partisipasi pemilih yang ada sekitar 68,9 persen, hal ini jauh di bawah target partisipasi yang dipatok KPU Pusat dalam gelaran Pilkada serentak 2017, yakni 77,5 persen.

## 1.2 KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbanyak pada tahun 2016 adalah golongan III sebanyak 5.452 atau 44,1% dari total pegawai 12.352 orang. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah PNS terbanyak masih golongan III sebanyak 4.981 atau 44,1% dari total pegawai 11.294 orang.

Selanjutnya perbandingan PNS menurut pendidikannya adalah sebagai berikut:



Grafik 1.1 Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan

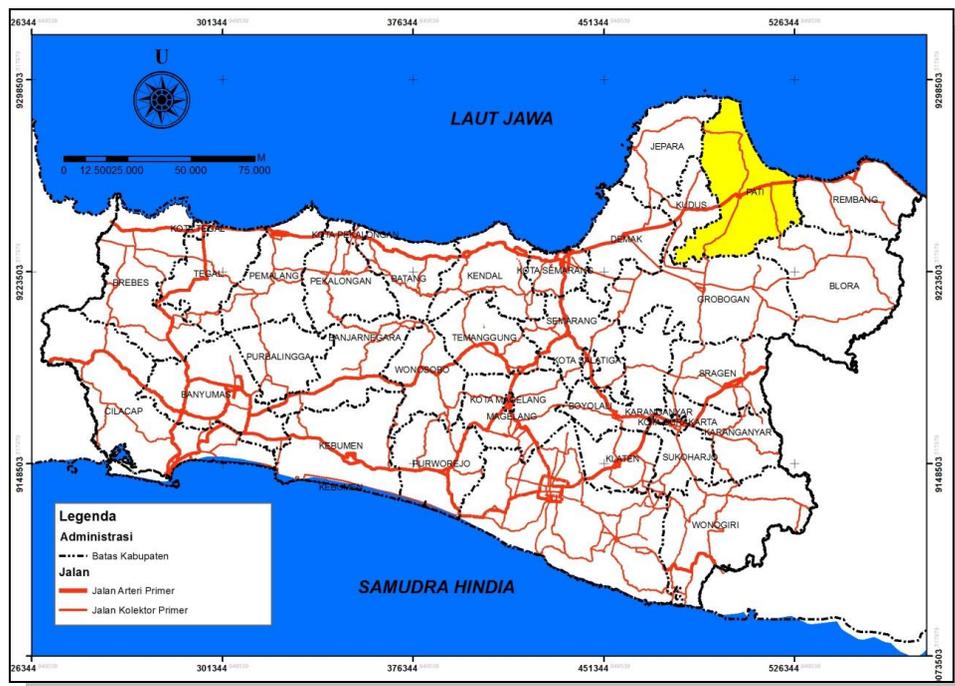
Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal yang terbanyak adalah S1 yaitu sebanyak 6.470 orang atau 57,29 persen.

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu

organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

### 1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM DAERAH

Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur Laut. Kota Pati, Juwana, dan Tayu dalam perencanaan pengembangan wilayah (struktur ruang) Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk rencana pola ruang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Pati merupakan salah satu kawasan lindung geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo. Untuk kawasan budidaya, wilayah Kabupaten Pati diarahkan untuk pengembangan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan rakyat, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan.



**Gambar 1.1**  
Peta Kedudukan Kabupaten Pati dalam Kancah Regional Provinsi Jawa Tengah

- 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi.  
Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 Ha (1.503,68 km<sup>2</sup>) dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:
  - a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
  - b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang;
  - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora;
  - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara.

### 1.4 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Berdasarkan proyeksi BPS Kabupaten Pati, jumlah penduduk pada tengah tahun 2016 sebanyak 1.239.989 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk sebesar 825 jiwa/km<sup>2</sup>. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga beban lingkungan hidup juga semakin tinggi.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km <sup>2</sup> )
2012	1.207.399	803
2013	1.218.016	810
2014	1.225.594	815
2015	1.232.889	820
2016*	1.239.989	825

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2012-2016

Perbandingan kepadatan penduduk kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan Kabupaten Pati memiliki kepadatan penduduk relatif rendah. Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Pati (825 jiwa/km<sup>2</sup>) menempati urutan ke-8 kepadatan penduduk terendah dari 29 kabupaten lainnya, setelah Kabupaten Blora (475), Wonogiri (521), Rembang (611), Grobogan (684), Purworejo (686), Wonosobo (789), dan Cilacap (792).

*Sex Ratio* penduduk Kabupaten Pati Tahun 2016 sebesar 93,97, artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kabupaten Pati, akan terdapat pula sebanyak 94 pria di dalamnya. Oleh karenanya, rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pati bisa dikatakan cukup seimbang. Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Jenis Kelamin	Tahun				
	2012	2013	2014	2015*	2016*
Laki-Laki	586.531	590.181	593.810	97.314	600.723
Perempuan	620.529	627.835	631.784	635.598	639.266
Jumlah Total	1.207.060	1.218.016	1.225.594	1.232.912	1.239.989
Laju Pertumbuhan (%)	0,71	0,91	0,62	0,60	0,57

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2012-2016

Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati menempati urutan ke-14 diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2012-2016, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati cenderung menurun.

## 1.5 SISTEMATIKA

Penyusunan LKjIP Kabupaten Pati Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

- BAB II** : PERENCANAAN KINERJA  
Pada bab ini diuraikan Sasaran setrategis dan perubahan atas indikator yang digunakan perjanjian kinerja tahun 2017 dan program kegiatannya.
- BAB III** : AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, serta analisis capaian kinerja.
- B. Realisasi Anggaran  
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- BAB IV** : PENUTUP  
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
- LAMPIRAN** : 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017.  
2) Lain-lain.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

**P**erencanaan pembangunan Kabupaten Pati mengikuti hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2017.

#### 2.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati pada tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan kelima (2017-2018) pembangunan lima tahunan yaitu tahapan pematapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, yang tujuan dan sarannya diarahkan untuk mewujudkan pencapaian meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian Visi Kabupaten 2012-2017 yaitu "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik". Yang kemudian pada akhirnya bertujuan untuk mendukung tercapainya visi jangka panjang Kabupaten Pati yaitu "Pati Bumi Mina Tani Sejahtera".

Pencapaian visi jangka menengah itu ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan pertanian dan industri.
5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah.
6. Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi.
7. Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Meningkatkan akhlak, budi pekerti dan apresiasi budaya masyarakat Kabupaten Pati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya karakter masyarakat, berakhlak mulia dan berbudi luhur.</li> <li>b. Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olah raga dan pengembangan seni budaya daerah dan pariwisata daerah.</li> <li>c. Meningkatnya gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan</li> </ul>
2.	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik.	Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja aparatur pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional .</li> <li>b. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>c. Meningkatnya pendapatan daerah, kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah.</li> <li>d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</li> <li>e. Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>f. Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana.</li> </ul>
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata</li> <li>2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas</li> <li>3. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>b. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.</li> <li>c. Meningkatnya tata kelola pendidikan yang efisien dan efektif.</li> <li>d. Meningkatnya budaya baca masyarakat.</li> <li>a. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk</li> <li>b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.</li> <li>c. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin</li> <li>d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan</li> <li>e. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.</li> <li>a. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.</li> </ul>
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan pertanian dan industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM untuk mendorong daya saing daerah</li> <li>2. Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.</li> <li>b. Meningkatnya daya saing produk industri UMKM baik di dalam maupun luar negeri.</li> <li>a. Meningkatnya produksi pertanian.</li> <li>b. Meningkatnya posisi tawar petani</li> </ul>

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
		daerah	dan nelayan. c. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri.
		3. Meningkatkan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral	a. Meningkatnya pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.
5.	Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah.	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya. b. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi. c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air. d. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman. e. Meningkatnya pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukannya.
6.	Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi.	1. Meningkatkan peran pengusaha/investor dengan pemerintah dalam kerjasama investasi	a. Meningkatnya minat pengusaha/investor.
7.	Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.	1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Meningkatkan kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan	a. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari. a. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja. b. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). c. Meningkatnya kerja sama antar daerah dalam penempatan transmigrasi. d. Berkurangnya persentase penduduk miskin. e. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pada tahun 2017 kebijakan pembangunan di Kabupaten Pati tetap difokuskan pada urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan pencapaian misi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, antara lain: tata pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, perikanan serta industri.

Sesuai dengan saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Pati melakukan perbaikan atas sasaran, sebagai berikut:

Tabel 2.2  
PEBAIKAN ATAS SASARAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN RPJMD	PERUBAHAN SASARAN	KETERANGAN
Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Meningkatnya posisi tawar petani dan nelayan.	Meningkatnya produksi Perikanan	Alasan pergantian karena indikator yang tersedia hanya jumlah produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Yang diukur dalam indikatornya hanya infrastruktur jalan saja.
Meningkatkan kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja.</li> <li>Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</li> <li>Meningkatnya kerja sama antar daerah dalam penempatan transmigrasi.</li> <li>Berkurangnya persentase penduduk miskin.</li> <li>Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.</li> </ol>	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	5 sasaran dirangkum dalam satu sasaran saja, dengan pengertian yang sama.

## 2.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama mengalami perubahan pada tahun 2017. Tahun 2013, terdapat 19 sasaran strategis dan 48 indikator kinerja utama. Sedangkan tahun 2017, terdapat 16 sasaran strategis dari tujuan RPJMD 2012-2017 dan 42 indikator kinerja utama yang merupakan indikator dari sasaran RPJMD. Perubahan tersebut disesuaikan dengan saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pati. Sasaran strategis Kabupaten Pati tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 yaitu :

Tabel 2.3  
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bangunan sekolah yang berkondisi baik (%)</li> <li>Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)</li> <li>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	4. Rasio guru terhadap murid
2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.	5. Angka kelulusan SD/MI (%)
	6. Angka kelulusan SMP/MTs (%)
	7. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs (%)
	8. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
3. Meningkatnya budaya baca masyarakat.	9. Jumlah Perpustakaan
	10. Jumlah Pengunjung perpustakaan
	11. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.	12. Kematian Ibu (kasus)
	13. Kematian Bayi (kasus)
	14. Persentase balita gizi buruk (%)
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	15. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)
	16. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	17. Cakupan desa siaga aktif (%)
	18. Persentase posyandu aktif (%)
7. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	19. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%)
	20. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
	21. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
8. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.	22. Persentase koperasi aktif (%)
	23. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM (%)
9. Meningkatnya produksi pertanian.	24. Produksi tanaman pangan padi sawah (ton)
	25. Produksi tanaman pangan jagung (ton)
	26. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
10. Meningkatnya produksi Perikanan	27. Perikanan tangkap
	28. Perikanan budidaya
11. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	29. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)
	30. Panjang jalan dilalui roda 4
12. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	31. Rumah tangga bersanitasi (%)
	32. Rumah tangga pengguna air bersih (%)
13. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	33. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
14. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34. Rumah tangga pengguna listrik (%)
	35. Rumah layak huni (%)
15. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.	36. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	37. Jumlah nilai investasi berskala nasional (M.rupiah)
16. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	38. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
	39. Tingkat pengangguran terbuka (%)
	40. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)
	41. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pati 2017 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kabupaten Pati 2017 yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2017 ini.

Pemerintah Kabupaten Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2017 ( lampiran I ), Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

RPJMD 2012-2017 Kabupaten Pati. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017 yang memiliki focus stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017

Tabel berikut memberikan gambaran program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2017 sesuai dengan APBD Kabupaten Pati untuk mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan target-target indikatornya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pati tahun 2017:

**Tabel 2.4**  
**MATRIK PROGRAM KEGIATAN DENGAN**  
**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PATI 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN
1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik (%)	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pendidikan Non Formal</li> <li>• Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</li> </ul>
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,05	
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	82	
	4. Rasio guru terhadap murid	1:09	
2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.	5. Angka kelulusan SD/MI (%)	99,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>• Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>
	6. Angka kelulusan SMP/MTs (%)	99,04	
	7. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,85	
	8. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	80	
3. Meningkatnya budaya baca masyarakat.	9. Jumlah Perpustakaan	1.626	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</li> </ul>
	10. Jumlah Pengunjung perpustakaan	30.000	
	11. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	46.098	
4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.	12. Kematian Ibu (kasus)	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</li> <li>• Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</li> <li>• Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</li> <li>• Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> </ul>
	13. Kematian Bayi (kasus)	165	
	14. Persentase balita gizi buruk (%)	0	
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	15. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</li> <li>• Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"</li> <li>• Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"</li> <li>• Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas</li> <li>• Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</li> <li>• Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>• Program pengadaan, peningkatan dan</li> </ul>
	16. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</li> <li>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</li> </ul>
6. <b>Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.</b>	17. Cakupan desa siaga aktif (%)	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</li> <li>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</li> </ul>
	18. Persentase posyandu aktif (%)	100	
7. <b>Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak</b>	19. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%)	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Keluarga Berencana</li> <li>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</li> <li>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</li> <li>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</li> <li>Program pelayanan kontrasepsi</li> <li>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</li> <li>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</li> <li>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</li> </ul>
	20. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	51,31	
	21. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	
8. <b>Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.</b>	22. Persentase koperasi aktif (%)	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengembangan industri kecil dan menengah</li> <li>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif</li> <li>Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah</li> <li>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</li> </ul>
	23. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM (%)	30	
9. <b>Meningkatnya produksi pertanian.</b>	24. Produksi tanaman pangan padi sawah (ton)	576.669	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</li> <li>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</li> <li>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</li> <li>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</li> <li>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</li> <li>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</li> <li>Program peningkatan produksi hasil peternakan</li> <li>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</li> </ul>
	25. Produksi tanaman pangan jagung (ton)	128.630	
	26. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,36	
10. <b>Meningkatnya produksi Perikanan</b>	27. Perikanan tangkap	44.637	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</li> <li>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan</li> <li>Program pengembangan perikanan tangkap</li> <li>Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan</li> <li>Program pengembangan budidaya perikanan</li> <li>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</li> </ul>
	28. Perikanan budidaya	43.350	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</li> </ul>
11. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	29. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</li> <li>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>Program pembangunan jalan dan jembatan</li> <li>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</li> <li>Program pengaturan jasa usaha konstruksi</li> <li>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)</li> </ul>
	30. Panjang jalan dilalui roda 4	812,7	
12. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	31. Rumah tangga bersanitasi (%)	95	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Lingkungan Sehat Perumahan</li> <li>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</li> <li>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</li> <li>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>
	32. Rumah tangga pengguna air bersih (%)	85	
13. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	33. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>Program pembangunan turap/talud/bronjong</li> <li>Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong</li> <li>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</li> </ul>
14. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34. Rumah tangga pengguna listrik (%)	97	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengembangan perumahan</li> <li>Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</li> <li>Program pengembangan lingkungan sehat</li> </ul>
	35. Rumah layak huni (%)	96	
15. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.	36. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>Program perencanaan pembangunan ekonomi</li> <li>Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik</li> <li>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</li> <li>Program penataan struktur industri</li> <li>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</li> </ul>
	37. Jumlah nilai investasi berskala nasional (M.rupiah)	1.060	
16. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	38. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</li> <li>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>Program pengembangan wilayah transmigrasi</li> <li>Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan</li> <li>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li> <li>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</li> <li>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</li> <li>Program pembinaan pedagang kakilima</li> </ul>
	39. Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,6	
	40. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,1	
	41. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)	83	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN
			dan asongan PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa</li> <li>• Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,</li> <li>• Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> </ul>

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2017, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, jumlah anggaran Kabupaten Pati Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.540.490.284.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.779.508.140.000,00 (atau 70% dari total anggaran Belanja) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 760.982.144.000,00 (atau 30% dari total anggaran Belanja).

**Tabel 2.5**  
**Target Belanja Daerah**

Uraian	Target (Rp)	%
Belanja Tidak langsung	1.779.508.140.000,00	70%
Belanja Langsung	760.982.144.000,00	30%
<b>Total belanja</b>	<b>2.540.490.284.000,00</b>	<b>100%</b>

Sumber: APBD Kab. Pati, 2017

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang utama pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dan program-program pendukung, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 561.729.624.705,00 atau sebesar 74% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 199.252.519.095,00 atau 26% dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan besaran anggaran 52,72% dari total belanja utama. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya sebesar 15,74% dari total anggaran belanja utama. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran meningkatnya budaya baca masyarakat hanya sebesar 0,03% dan anggaran untuk meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM hanya sebesar 0,29% dari total anggaran belanja langsung utama yang berkaitan

langsung dengan indikator kinerja.

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	RA	%
1.	Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	9.170.781.000	1,63%
2.	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.	39.329.809.000	7,00%
3.	Meningkatnya budaya baca masyarakat.	195.996.000	0,03%
4.	Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.	1.981.3430.250	0,35%
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	296.165.862.200	52,72%
6.	Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	15.857.968.100	2,82%
7.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.812.599.245	0,68%
8.	Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.	1.612.250.000	0,29%
9.	Meningkatnya produksi pertanian.	7.458.011.000	1,33%
10.	Meningkatnya produksi Perikanan	13.759.575.000	2,45%
11.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	88.433.053.200	15,74%
12.	Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	17.411.224.150	3,10%
13.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	35.016.386.000	6,23%
14.	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	8.300.495.750	1,48%
15.	Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.	16.424.120.465	2,92%
16.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	6.800.150.770	1,21%
	<b>Total</b>	561.729.624.705	100%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Pati 2017

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari SAKIP itu sendiri, yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Jadi, akuntabilitas bukanlah sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Kinerja atau juga disebut *performance* dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2017. Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

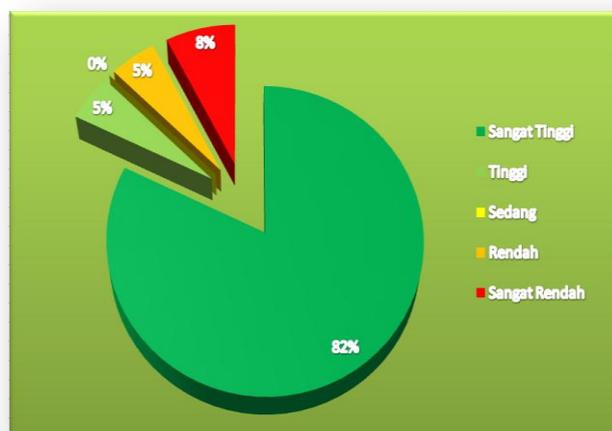
**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik (%)	80	66,17	83	Tinggi
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,05	99,9	100	Sangat Tinggi
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	82	81,39	102,7	Sangat Tinggi
	4. Rasio guru terhadap murid	1:09	1:09	100	Sangat Tinggi
2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.	1. Angka kelulusan SD/MI (%)	99,5	100	101	Sangat Tinggi
	2. Angka kelulusan SMP/MTs (%)	99,04	99,7	100,67	Sangat Tinggi
	3. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,85	102,58	102,73	Sangat Tinggi
	4. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S <sub>1</sub> /D-IV (%)	80	91,37	114,21	Sangat Tinggi
3. Meningkatnya budaya baca masyarakat.	1. Jumlah Perpustakaan	1.626	1.512	93	Sangat Tinggi
	2. Jumlah Pengunjung perpustakaan	30.000	34.520	115	Sangat Tinggi
	3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	46.098	54.143	117	Sangat Tinggi
4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.	1. Kematian Ibu (kasus)	16	20	107	Sangat Tinggi
	2. Kematian Bayi (kasus)	165	153	108	Sangat Tinggi
	3. Persentase balita gizi buruk (%)	0	0,09	<-800	Sangat Rendah
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	100	100	100	Sangat Tinggi
	2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	Sangat Tinggi
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	1. Cakupan desa siaga aktif (%)	100	46.89	46.89	Sangat Rendah
	2. Persentase posyandu aktif (%)	100	61	61	Rendah
7. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	1. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%)	100	100	100	Sangat Tinggi
	2. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	51,31	68,05	132	Sangat Tinggi
	3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	Sangat Tinggi
8. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.	1. Persentase koperasi aktif (%)	100	52	52	Sangat Rendah
	2. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM (%)	30	77	257	Sangat Tinggi
9. Meningkatnya produksi pertanian.	1. Produksi tanaman pangan padi sawah (ton)	576.669	641.601	111	Sangat Tinggi
	2. Produksi tanaman pangan jagung (ton)	128.630	168.376	131	Sangat Tinggi
	3. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,36	57,68	93	Sangat Tinggi
10. Meningkatnya produksi Perikanan	1. Perikanan tangkap	44.637	26.864	60	Rendah
	2. Perikanan budidaya	43.350	42.510	98	Sangat

					Tinggi
11. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	65	73,51	113	Sangat Tinggi
	2. Panjang jalan dilalui roda 4	812,7	837,377	103	Sangat Tinggi
12. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	1. Rumah tangga bersanitasi (%)	95	93	98	Sangat Tinggi
	2. Rumah tangga pengguna air bersih (%)	85	74,36	87	Tinggi
13. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	85	85	100	Sangat Tinggi
14. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Rumah tangga pengguna listrik (%)	97	99,48	105	Sangat Tinggi
	2. Rumah layak huni (%)	96	91	97	Sangat Tinggi
15. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.	1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	17	41	241	Sangat Tinggi
	2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (M.rupiah)	1.060	646	60	Rendah
16. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,4	68,29	93	Sangat Tinggi
	2. Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,6	3,89	239	Sangat Tinggi
	3. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,1	2,3	230	Sangat Tinggi
	4. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)	83	86	104	Sangat Tinggi

Dari 41 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 32 IKU telah memenuhi kriteria **sangat tinggi** (82%), 2 IKU memenuhi kriteria **tinggi**, 2 IKU memenuhi kriteria **rendah**; dan 3 IKU memenuhi kriteria **sangat rendah**.

**Grafik 3.1**  
**Capaian Kinerja Kabupaten Pati Tahun 2017**



Mayoritas IKU Bupati Pati tahun 2017 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria sangat tinggi (81%).

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hingga akhir tahun 2017 yang merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Pati secara bertahap beberapa indikator telah dicapai hingga melampaui target terakhir namun ada juga beberapa indikator sangat rendah capaiannya.

Berikut ini hasil evaluasi dan analisis tingkat capaian kinerja dari 16 (enam belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2017.

### 3.2.1 Tujuan: “Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan secara merata”

Dalam upaya meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan secara merata, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi mencukupi daya tampung dan meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar/menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

#### 1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah

Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah mempunyai 4 (empat) indikator untuk menilai kinerjanya, tahun 2017 kinerjanya sangat tinggi dengan capaian indikatornya adalah sebagai berikut;

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah**

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik	Persen	80	66,17	82,71
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,05	99,90	100,40
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	82	81,39	102,70
4. Rasio guru terhadap murid	Rasio	1:9	1:9	100
Rata-Rata Capaian				96

#### ***Uraian Pencapaian Indikator:***

Bagian penting dari tercukupinya data tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Bangunan sekolah yang berkondisi baik pada tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar 80% terealisasi sebesar 66,17%. Ini berarti capaian indikatornya sebesar 82,71%.

Tabel 3.4 Kondisi Sekolah di Kabupaten Pati

No	Sekolah /Madrasah	Jumlah	Kondisi Baik	
		Ruang Kelas	Jumlah	%
1.	SD/MI	5.504	3.466	62,97
2.	SMP/MTs	2.261	1.672	73,95

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2017

Dari 5.504 gedung SD/MI yang ada di wilayah Kabupaten Pati terdapat 3.466 gedung SD/MI dalam kondisi baik atau sebesar 62,97%. Gedung SMP/MTs dari total 2.261 gedung terdapat 1.672 gedung atau 73,95% yang berkondisi baik. Sedangkan untuk data jumlah gedung SMA/SMK/MA Tahun 2017 tidak teridentifikasi karena mulai Tahun 2017 SMA/SMK/MA bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Tingkat capaian pada tahun ini kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena perhitungan prosentase bangunan sekolah berkondisi baik hanya berdasar data SD/MI serta SMP/MTs.

Bangunan sekolah yang berkondisi baik pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan sebesar 80% terealisasi sebesar 66,17%. Ini berarti capaian indikatornya sebesar 82,71%. Dari 5.504 gedung SD/MI yang ada di wilayah Kabupaten Pati terdapat 3.466 gedung SD/MI dalam kondisi baik atau sebesar 62,97%, sedangkan gedung SMP/MTs dari total 2.261 gedung terdapat 1.672 gedung atau 73,95% yang berkondisi baik.

Tingkat capaian pada tahun ini kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena perhitungan prosentase bangunan sekolah berkondisi baik hanya berdasar data SD/MI serta SMP/MTs. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh capaian keluaran yang berupa penambahan dan pembangunan serta pengadaan sarana prasarana pendidikan yang meliputi antara lain: Penambahan ruang kelas sekolah, Pembangunan sarana air bersih dan sanitary, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, Pengadaan mebel sekolah, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Kabupaten Pati.

Angka Partisipasi Murni merupakan rasio jumlah siswa kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A pada tahun 2017 kinerjanya tercapai 100,40% dari target yang telah ditetapkan 99,50% terealisasi sebesar 99,90%. Artinya ada 104.312 siswa usia 7-12 tahun masuk dijenjang SD/MI/Paket A di Kabupaten Pati dari 104.417 orang jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

Sesuai indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B kinerja tahun 2017 masuk dalam kategori tinggi yaitu 102,70% dari target yang ditetapkan sebesar 79,25% terealisasi sebesar 81,39%, jumlah siswa usia 13-15 tahun yang berjumlah 45.068 orang mengikuti pendidikan dijenjang SMP/MTs/Paket B dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Kabupaten Pati yang berjumlah 55.365 orang.

Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru juga menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan akses pendidikan. Rasio guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan akses dan pemenuhan hak warga atas pendidikan yang layak dan memadai.

Perbandingan jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pati 15.076 orang terhadap jumlah murid SD/MI dan SMP/MTs, yang ada di Kabupaten Pati 175.895 orang. Target yang ditetapkan seorang guru mengampu 9 murid terpenuhi, pada Tahun 2017 telah terpenuhi dengan nilai capaian kinerja 100%

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2017 dan target yang dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Indikator Sasaran**  
**Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah**

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017
1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik (%)	101,38	88,03	100,91	82,71
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	100,31	100,65	100,55	100,40
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	100,61	102,85	103	102,70
4. Rasio guru terhadap murid	97	97	97	100

#### Analisa Perbandingan:

##### 1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik

Bangunan sekolah yang berkondisi baik pada tahun 2014-2017 target yang ditetapkan selalu meningkat dengan harapan pada akhir RPJMD tercapai 80% bangunan sekolah di Kabupaten Pati dalam kondisi baik. Namun pada kenyataannya data menunjukkan bahwa terjadi penurunan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2015 bangunan sekolah dalam kondisi baik terjadi penurunan dari 65,9% menjadi 61,62% bangunan sekolah dalam kondisi baik, meskipun jika dikategorikan capaian kinerja masih dalam kategori tinggi. Tahun 2016 terjadi peningkatan kondisi baik yaitu dari target 75% teralisasi 75,68 % sehingga kinerja mencapai 100,91%. Pada Tahun 2017 jika dilihat sepiantas realisasi bangunan berkondisi baik terjadi penurunan lagi. Dari target yang ditetapkan 80% tercapai 66,17%, sehingga capaian kinerja 82,71%. Tetapi kalau dilihat setiap satuan pendidikan terjadi kenaikan prosentase. Hal ini dapat disampaikan bahwa untuk Tahun 2017 data yang disajikan hanya untuk satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs karena Satuan pendidikan menengah sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

##### 2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni baik untuk kelompok SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, selalu menunjukkan kinerja yang tinggi rata-rata sudah mencapai harapan yang hendak dicapai di akhir RPJMD. Mulai tahun 2015 sampai tahun 2017, Angka Partisipasi Murni kelompok SD/MI/Paket A sudah melebihi 0,4% dari kondisi yang seharusnya dicapai pada akhir RPJMD. Sedangkan kelompok SMP/MTs/Paket B mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 sudah melebihi target masing-masing tahun yang telah direncanakan dalam RPJMD.

##### 3. Rasio guru terhadap murid

Dari tahun 2014-2015 rasio guru terhadap murid cenderung menurun, tahun 2014 tercapai 80%. Di tahun 2015 kinerjanya lebih menurun lagi yaitu 78%. Pada Tahun 2016 kinerja tercapai 78%. Rasio guru terhadap murid ditahun 2017 capaian kinerja 100% dengan arti bahwa satu guru mengampu 9 orang siswa.

Permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh distribusi guru yang belum merata. Disamping itu dengan adanya kebijakan moratorium pengangkatan PNS oleh pemerintah sehingga tidak ada guru baru yang mengajar di sekolah pinggiran. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan pengangkatan guru PNS baru, terutama untuk daerah-daerah terpencil dan pinggiran.

Keberhasilan Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah tersebut tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, serapan anggarannya 99% dari RP 9.293.152.000 anggaran setelah perubahan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.164.901.440

program yang dilaksanakan yaitu; Program Pendidikan Non Formal dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

**2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan**

Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan sasaran strategis meskipun tidak masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 karena target sudah tercapai lebih dari 100%, 4 (empat) indikator untuk menilai kinerjanya adalah sebagai berikut;

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan**

INDIKATOR KINERJA	T	R	Capaian
1. Angka kelulusan SD/MI (%)	99,5	100	100,50
2. Angka kelulusan SMP/MTs (%)	99,04	99,7	100,67
3. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,85	102,58	102,73
4. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	80	91,37	114,21
	<b>Rata-rata</b>		<b>104,5</b>

**Angka kelulusan**

Angka Kelulusan merupakan rasio jumlah lulusan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran sebelumnya. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan sebesar 99,50% terealisasi sebesar 100%. Angka realisasi sebesar 100% diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 18.592 orang terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 18.592 orang. Ini berarti persentase capaian indikatornya sebesar 100,50% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

**Tabel 3.7 Angka Kelulusan**

SD/MI Tahun 2017			
Satuan Pendidikan	Peserta Ujian	Lulus	Lulus (%)
SD	14.534	14.534	100
MI	4.058	4.058	100
<b>Total</b>	<b>18.592</b>	<b>18.592</b>	<b>100</b>

Tabel Angka Kelulusan SMP/MTs Tahun 2017			
Satuan Pendidikan	Peserta Ujian	Lulus	Lulus (%)
SMP	10.922	10.897	99,77
MTs	7.799	7.768	99,60
<b>Total</b>	<b>18.721</b>	<b>18.665</b>	<b>99,70</b>

Angka Kelulusan SMP/MTs tahun 2017 dari target yang telah ditetapkan sebesar 99,04% terealisasi sebesar 99,70%. Realisasi sebesar 99,70% diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 18.665 orang

terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 18.721 orang. Ini berarti persentase capaian indikatornya sebesar 100,67% sehingga masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

### Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan merupakan rasio jumlah siswa tingkat baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu tahun ajaran sebelumnya. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs tahun 2017 kinerjanya mencapai 102,73% dari target yang ditetapkan sebesar 99,85% terealisasi sebesar 102,58% yaitu perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs yang berjumlah 19.072 orang terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya yang berjumlah 18.592 orang.

**Tabel 3.8**

**Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018**

Satuan Pendidikan	Lulus	Siswa Baru Kls I SMP/MTs	AM (%)
SD/MI	18.592	19.072	102,58

Angka Melanjutkan yang besar ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Pati relatif lebih baik dari daerah atau kabupaten sekitarnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingginya angka kelulusan dan capaian nilai yang tinggi dalam setiap Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah. Selain itu keberhasilan kontingen Kabupaten Pati dalam menjuarai berbagai lomba baik yang diselenggarakan di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional juga menjadi salah satu daya tarik banyaknya siswa dari kabupaten tetangga yang bersekolah di Kabupaten Pati, terutama terjadi pada kecamatan atau sekolah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain.

Data tidak tersaji karena dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tidak lagi melakukan pendataan pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA).

### Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

**Tabel 3.9**

**Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017**

Satuan Pendidikan	Jumlah Guru	Berkualifikasi S1 / D4		Guru Bersertifikasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
SD	7.118	6.614	92,92	3.436	48,27
MI	2.545	2.162	84,95	779	30,61
SMP	2.555	2.490	96,67	1.352	52,92
MTs	2.858	2.508	83,73	1.051	36,77
<b>Jumlah</b>	<b>15.076</b>	<b>13.774</b>	<b>91,36</b>	<b>6.618</b>	<b>43,90</b>

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2017 persentase capaian indikatornya tercapai 114,21% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*. Dari target yang ditetapkan sebesar 80% terealisasi sebesar 91,37%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 13.774 orang terhadap jumlah guru SD/MI, SMP/MTs yang ada di Kabupaten Pati sebanyak 15.076 orang.

Analisis capaian;

1. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan sebesar 99,50% terealisasi sebesar 100%.
2. Angka Kelulusan SMP/MTs tahun 2017 dari target yang telah ditetapkan sebesar 99,04% terealisasi sebesar 99,70%.

3. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs tahun 2017 kinerjanya mencapai 102,73% dari target yang ditetapkan sebesar 99,85%.
4. Dari target guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang ditetapkan sebesar 80% terealisasi sebesar 91,37%.

Dalam usaha mencapai sasaran meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menetapkan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan kualitas para pendidik dan tenaga kependidikan, dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran.

Keberhasilan capaian kinerja untuk sasaran ini didukung adanya Kegiatan antara lain : Pelaksanaan Sertifikasi pendidik, Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan, Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi

### **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014 – 2017 akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Indikator Kinerja**  
**Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan**

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017
1. Angka kelulusan SD/MI (%)	100,67	100,70	100,70	100,50
2. Angka kelulusan SMP/MTs (%)	101,03	100,98	100,94	100,67
3. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs (%)	101,10	101,08	107,79	102,73
4. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	106,93	115,01	114,57	114,21

#### **1. Angka Kelulusan (AK)**

Angka Kelulusan baik untuk tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA telah menunjukkan kinerja yang tinggi dengan rata-rata capaian di atas 100% setiap tahunnya dan sudah mencapai harapan yang hendak dicapai di akhir RPJMD. Pada tahun 2017, untuk tingkat pendidikan SD/MI sudah melebihi 0,5% dari kondisi yang seharusnya dicapai pada akhir RPJMD, kelompok SMP/MTs masing-masing lebih 0,66% dari target akhir RPJMD.

#### **2. Angka Melanjutkan (AM)**

Angka Melanjutkan baik untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs telah menunjukkan kinerja yang sangat baik terlihat dari capaian kinerja setiap tahunnya yang sudah melampaui harapan yang ingin dicapai pada akhir RPJMD.

#### **3. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**

Berbanding lurus dengan angka kelulusan maupun angka melanjutkan, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV juga telah mampu menunjukkan kinerja yang baik,

terlihat dari kinerja setiap tahunnya yang telah melampaui target yang ditetapkan bahkan pada tahun 2016 telah melampaui harapan yang ingin dicapai pada akhir RPJMD sebesar 7,91%. Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja sudah melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 11,37% Hasil ini diharapkan mampu dipertahankan oleh Kabupaten tidak hanya sampai akhir RPJMD akan tetapi sampai tahun-tahun yang akan datang.

Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan dilaksanakan dengan program kegiatan yang menyerap dana sebesar 35.658.294.349, 88% dari anggaran yang di rencanakan sebesar 40.501.396.000 Program yang dilaksanakan adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### 3. Meningkatnya budaya baca masyarakat

Meningkatnya budaya baca masyarakat merupakan sasaran strategis yang selalu Kinerjanya sangat tinggi, berikut ini capaian 3 (tiga) indikator kinerjanya.

**Tabel 3.11**  
**Capaian Indikator**  
**Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Jumlah perpustakaan	Unit	1.626	1.512	93
2. Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	30.000	34.520	115
3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	46.098	54.143	117
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>108,33</b>

#### **Analisis capaian**

Dengan adanya Permendikbud No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis alokasi dana BOS untuk pengadaan buku perpustakaan sebesar 20%, sehingga dengan asumsi sekolah sudah membentuk perpustakaan sekolah. Dengan demikian, hal ini menjadi penyebab adanya kenaikan jumlah perpustakaan dari 1.137 unit untuk tahun 2016 menjadi 1.512 unit pada tahun 2017.

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan oleh fasilitas wifi dan komputer gratis, kunjungan berkelompok dari berbagai kalangan (sekolah dan ormas), dan kegiatan pelibatan masyarakat (pelatihan-pelatihan) yang diadakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pati. Buku yang dipinjam 18.820 eks, dari 34.520 pengunjung, peminjam sebanyak 8.440 orang. Penambahan anggota baru sebanyak 1.740 orang dari total anggota keseluruhan 4.652 orang.

Jumlah koleksi bahan bacaan mengalami peningkatan disebabkan oleh pengadaan koleksi bahan bacaan 531 judul (1.671 eks) dan adanya hibah buku dari Perpustakaan Nasional RI dan masyarakat umum 400 judul (800 eks).

Gambar : 3.1 Penyerahan Mobil Perpustakaan Keliling di serahkan langsung Djoko Ujjianto yang di dampingi Bupati Pati Haryanto di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat 24/11/2017.



### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014 – 2017 akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
Perbandingan Indikator Kinerja  
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah Perpustakaan	86	85	75	93
2. Jumlah Pengunjung perpustakaan	76	107	110	115
3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	114	116	114	117

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Pati cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun disebabkan adanya kebijakan peraturan baru dari berbagai kementerian maupun non kementerian (Desa, Dikbud maupun Perpustakaan RI) yang mendasari dalam pengelolaan perpustakaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun disebabkan karena adanya variasi layanan perpustakaan yang disediakan oleh Perpustakaan Daerah (layanan wifi dan internet gratis, Perpustakaan keliling, layanan kunjungan berkelompok, kegiatan pelibatan masyarakat).

Jumlah koleksi bahan bacaan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun disebabkan karena adanya pengadaan bahan bacaan perpustakaan daerah setiap tahunnya dan hibah dari Perpustakaan RI maupun masyarakat umum.

**Tabel 3.13**  
Jumlah Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Pati 2017

JENIS	2014	2015	2016	2017
SD	385	435	385	705
SMP	198	208	198	213
SMA/SMK	160	165	160	160
UNIVERSITAS	6	6	6	6
PERPUS DESA	344	347	344	344
PERPUS TEMPAT IBADAH	25	25	25	45
TAMAN BACAAN MASYARAKAT	7	7	7	17
PERPUSTAKAAN KHUSUS	12	13	12	22
<b>Jumlah</b>	<b>1.127</b>	<b>1.206</b>	<b>1.127</b>	<b>1.512</b>

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya dukungan yang besar dari pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah buku baik yang berasal dari pengadaan sendiri maupun hibah dari pihak-pihak lain.

Kendala dan hambatan yang dialami dalam mencapai indikator budaya baca masyarakat adalah, Belum semua sekolah mengalokasikan dana dan sarpras untuk penyelenggaraan perpustakaan; Adanya regroup sekolah (penggabungan dua/lebih sekolah menjadi satu sekolah) menyebabkan berkurangnya jumlah perpustakaan; Gedung perpustakaan yang tidak dimanfaatkan untuk perpustakaan tetapi digunakan untuk fasilitas yang lain (ruang kelas) atau tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsi gedung perpustakaan sebagai tempat layanan untuk pemustaka (pengunjung perpustakaan); Efisiensi anggaran, menyebabkan pembinaan dan monev perpustakaan belum menjangkau seluruh perpustakaan yang ada di Kabupaten Pati; Belum semua desa mengalokasikan dana dan sarpras untuk penyelenggaraan perpustakaan;

Hal yang dapat telah mendukung adalah adanya fasilitas wifi dan komputer gratis untuk akses internet bagi pemustaka (pengunjung perpustakaan), Adanya kunjungan berkelompok dari berbagai kalangan (sekolah, ormas), Adanya kegiatan pelibatan masyarakat (pelatihan-pelatihan) yang diadakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pati, Adanya pengadaan koleksi bahan bacaan setiap tahun dan adanya hibah bacaan buku Perpustakaan Nasional RI dan dari masyarakat umum.

Meningkatnya budaya baca masyarakat dilaksanakan dengan program kegiatan yang menyerap dana sebesar 266.153.900, 98% dari anggaran yang di rencanakan sebesar 270.996.000 Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

### 3.2.2 Tujuan: “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas”

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sasaran yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati meliputi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), penurunan balita gizi buruk, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Adapun uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

#### 4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk

Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 yaitu prioritas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, ada 3 (tiga) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.14**  
**Capaian Indikator**  
**Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan Balita Gizi Buruk**

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Kematian ibu(kasus)</b>	Kasus	16	20	107%
<b>Kematian bayi (kasus)</b>	Kasus	165	153	108%
<b>Persentase balita gizi buruk</b>	Persen	0,0	0,09	<-800%
<b>Rata-rata Capaian</b>				-210%

**Uraian Pencapaian Indikator:**

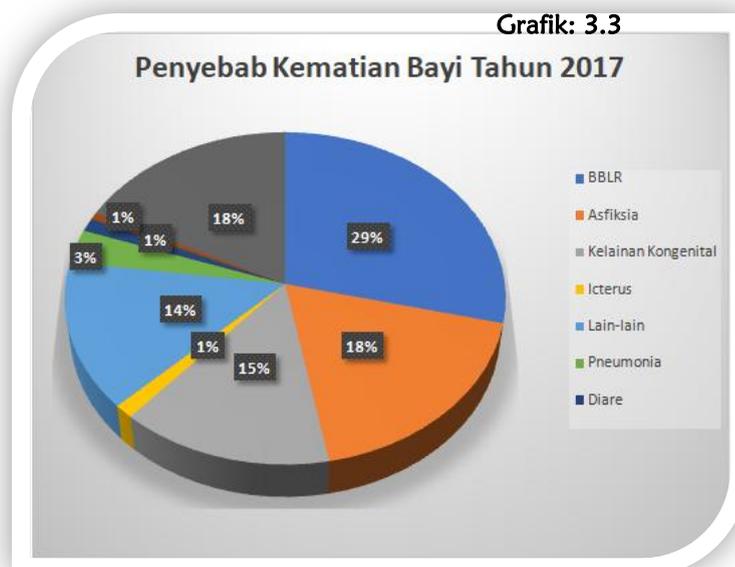
**1. Kematian Ibu**

Kematian ibu tahun 2017 sebesar 85.87/100.000KH adalah kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan proses kehamilan (tanpa melihat usia gestasi), persalinan dan nifas (masa kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan), tidak termasuk kecelakaan/kejadian insidental. Penyebab kematian Ibu sebagian besar penyebab kematian ibu tahun 2017 adalah penyakit jantung yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Sedangkan penyebab lain-lain yaitu: pre eklamsia berat, perdarahan, emboli air ketuban dan infeksi.



**2. Kematian Bayi**

Kematian bayi tahun 2017 sebesar 8.75/1000KH merupakan kematian umur janin > 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal/bayi lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 0 -11 bulan. Tahun 2016 terdapat 188 kasus, sedangkan pada tahun 2017 kasus kematian bayi sebanyak 153 kasus. Terdapat penurunan kasus kematian bayi dari tahun 2016 ke tahun 2017. Penyebab kematian terbesar pada bayi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 28.75%, sedangkan penyebab kematian bayi lainnya adalah asfiksia, kelainan kongenital, icterus, pneumonia, diare, kelainan saluran cerna dan lain-lain.



**3. Balita Gizi Buruk**

Penyebab langsung gizi buruk bukan hanya asupan makanan yang kurang, akan tetapi juga disebabkan oleh penyakit dan keterlambatan deteksi dini terhadap penanganan kasus gizi buruk. Sedangkan penyebab tidak langsung yang menyebabkan masalah gizi yaitu ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, pola pengasuhan anak kurang memadai dan pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai. Pada tahun 2016 kasus gizi buruk sebanyak 94 kasus dan di tahun 2017 sebanyak 78 kasus. Terjadi penurunan kasus gizi buruk dari tahun 2016 ke tahun 2017. Semua kasus gizi buruk telah ditangani (100%). Penurunan dikarenakan *skill* dan *knowledge* petugas semakin baik dalam mengenali dan menganalisa kasus gizi buruk di masyarakat. Selain itu juga karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan baik di POSYANDU maupun di PUSKESMAS.

Bila dilihat dari target dan capaian kinerja *SPM Kesehatan maka sudah berhasil yaitu target kasus gizi buruk 0,11% dan realisasi 0,09%*. Bila dilihat dari trend Kabupaten Pati selama 5 tahun terakhir maka Kabupaten Pati mampu menurunkan kasus gizi buruk meskipun jauh dari target. Target RPJMD sebesar 0,02% maka dinilai terlalu over optimis bila dilihat dari posisi awal periode RPJMD 2012-2017 yaitu 0,2. Apalagi bila diminta menjadi nihil atau 0 di tahun 2017.

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2015-2017 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan Balita Gizi Buruk**

INDIKATOR	2015	2016	2017
1. Kematian Ibu (kasus)	86	82	107
2. Kematian Bayi (kasus)	102	88	108
3. Persentase balita gizi buruk (%)	-200	-800	-<800

#### 1. Kematian ibu

Kasus kematian ibu tahun 2016 lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 20 kasus dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 21 kasus. Angka kematian ibu diharapkan dapat ditekan hingga 16 kasus di tahun 2017.

Sebab tidak berhasilnya penurunan AKI dikarenakan semakin tertibnya pencatatan dan pelaporan sehingga kasus yang ada dapat dialporkan dan tidak terlewatkan, sistem rujukan yang belum optimal, Puskersmas PONED belum berfungsi optimal, masih ada keterlambatan penanganan kasus kegawat daruratan maternal di Rumah Sakit (SPOG tidak *onsite* di RS tapi masih *on call*, Dokter Anestesi di beberapa RS juga masih banyak yang *on call*//belum ad Dokter anestesi yang tetap), kurangnya stabilisasi pra Rujukan dari PPK 1, kompetensi SDM yang masih kurang, peran serta masyarkat yang masih kurang dalam kepedulian ibu hamil. Selain itu juga kasus – kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas yang tidak bisa di prediksi (pada awal normal akan tetapi tiba-tiba menjadi komplikasi atau kegawatdaruratan).

Rencana aksi tahun 2017 untuk mencapai target RPJMD antara lain adanya jejaring sistem rujukan sijari emas (sistem jejaring – maternal dan neonatal), deteksi dini resiko tinggi ibu hamil oleh Dokter Spesialis Kandungan, pembentukan forum masyarakat madani peduli penurunan AKI – AKB, peningkatan peran pokja penyelamatan ibu dan bayi baru lahir, pembinaan bidan baik bidan koordinator maupun bidan desa, peningkatan kualitas pemeriksaan ibu hamil (ANC Terpadu), peningkatan kualitas P4K, peningkatan kualitas AMP (Audit Maternal Perinatal) dan melakukan superfisi fasilitatif terhadap semua puskesmas di wilayah Kabupaten Pati.

## 2. Kematian bayi

Kasus kematian bayi di Kabupaten Pati pada tahun 2015 kasus kematian bayi dapat ditekan menjadi 170 kasus realisasinya cukup menggembirakan karena dapat ditekan sehingga hanya terjadi 167 kasus.

Sedangkan pada tahun 2016 ini kasus kematian bayi meningkat dari target yang ditetapkan sebanyak 185 kasus, akan tetapi realisasinya sebesar 88 kasus.

Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi) belum tercapai karena kondisi sarana dan pra sarana untuk bayi baru lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan yang masih kurang, ketrampilan tenaga kesehatan yang kurang dalam penanganan kasus gawat darurat neonatal (stabilisasi pasien masih kurang), sistem jejaring rujukannya yang belum optimal, fungsi PONEK belum optimal dan RS PONEK di Kabupaten Pati baru 1 (satu) yaitu RSUD Soewondo Pati.

Rencana aksi/program yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai RPJMD tahun 2017 yaitu peningkatan komitmen dengan lintas sektor dan lintas program tentang pelayanan kesehatan bayi, peningkatan sistem jejaring rujukan neonatal, meningkatkan sarana pra sarana yang ada untuk kegawat daruratan neonatal, peningkatan kualitas SDM dalam penanganan kasus kegawat daruratan neonatal dan mengaktifkan DTPS KIBBLA (District Team Problem Solving Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak) yang sudah terbentuk di Kabupaten Pati.

## 3. Persentase balita gizi buruk

Pada tahun 2016 jumlah balita mengalami gizi buruk mengalami peningkatan, dari target yang ditetapkan sebesar 0,01%, realisasinya sebesar 0,10% cakupan balita gizi buruk tertangani. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tersedianya dana untuk PMT pemulihan, dimulai dari PMT gizi kurang, tidak mampu menurunkan kasus menjadi Gizi Buruk. Penyebab dari Gizi Buruk secara tidak langsung dapat disebabkan karena faktor ekonomi keluarga, meskipun sering juga didapatkan kasus gizi buruk pada anak-anak yang berasal dari keluarga menengah keatas karena akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap jenis-jenis makanan yang baik dan mengandung gizi seimbang yang harus dikonsumsi oleh anak (tingkat kesadaran masyarakat tentang gizi masih rendah). Tahun 2016 Program yang dilaksanakan adalah Perbaikan gizi masyarakat dengan mengerjakan Kegiatan perawatan balita gizi buruk Faktor yang mempengaruhi tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari LP&LS sehingga kasus gizi buruk sering kambuh rencana aksi yang akan dikerjakan adalah dengan peningkatan kerjasama LP & LS melalui media yang ada.

Penyebab tingginya kasus gizi buruk dan kenaikan target dari tahun 2015 ke 2016 dikarenakan *skill* dan *knowledge* petugas semakin baik dalam mengenali dan menganalisis kasus gizi buruk yang ada, disamping itu kesadaran masyarakat juga semakin baik, mau menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas/POYANDU dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, balita dan anak. Selain hal tersebut diatas bila kita bandingkan target SPM Kesehatan 2016 yaitu 100 kasus atau 0.11% dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 0.11% atau 94 kasus dan semua kasus gizi buruk telah tertangani/mendapat perawatan (100%), maka kita masuk dalam katagori berhasil. Pada tahun 2017 nanti atau akhir RPJMD ditargetkan bahwa 0 atau tidak ada kasus gizi buruk di Kabupaten Pati.

Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk dijalankan dengan Rencana aksi tahun 2017 yang dikerjakan melalui peningkatan kerjasama LP & LS melalui media yang ada, perawatan balita gizi buruk, pembentukan CFC (Community Feeding Center) di desa dan orientasi petugas dalam PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak). Anggaran yang disediakan sebesar 1,891,906,025 terserap 89% atau 1,677,288,813, program yang dijalankan adalah;

- Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

- Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

## 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan sasaran strategis yang masuk prioritas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2016, dari 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya, Kabupaten Pati termasuk berkinerja *sangat tinggi*.

Tabel 3.16  
Capaian Indikator  
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah)	Persen	100	100	100
2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>				100

### Uraian Pengukuran Kinerja:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan sasaran strategis yang masuk prioritas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017, dari (dua) indikator untuk menilai kinerjanya, Kabupaten Pati termasuk berkinerja sangat tinggi.

#### 1. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di Puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) .

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 adalah pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) Kabupaten/Kota. Sedangkan gawat darurat level 1 itu sendiri merupakan tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Pada tahun 2017, cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) di Kabupaten Pati dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari perbandingan pelayanan gawat darurat level 1 terhadap jumlah rumah sakit Kabupaten/Kota, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*. Hal ini berarti seluruh sarana kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta telah semuanya mampu untuk memberikan pelayanan gawat darurat level 1.

## 2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru). Adapun yang dimaksud dengan sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

Kelemahan dari penghitungan indikator ini terletak pada perbandingan antara jumlah pasien miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada di kabupaten/kota, sehingga tidak mungkin capaiannya akan mencapai 100%. Cakupan rujukan masyarakat miskin sebanyak 31.146 masyarakat miskin yang dirujuk, sedangkan jumlah masyarakat miskin seluruhnya adalah 617.457. Dengan demikian masyarakat miskin yang dirujuk adalah 5.04% dari jumlah masyarakat miskin yang ada. Seharusnya cakupannya didasarkan pada jumlah pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan dan targetnya 100%, maka dengan begitu seluruh masyarakat miskin yang berkunjung baik yang tidak dirujuk maupun yang dirujuk akan tertangani 100%.

### *Evaluasi dan Analisis Kinerja*

Perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2016 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
1. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	100	100	100	100
2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100

### 1. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah).

Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) tahun 2014-2017 target yang ditetapkan selalu 100% dengan harapan bahwa seluruh sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Pati baik puskesmas dan rumah sakit baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta telah mampu untuk memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Dan kenyataannya menunjukkan bahwa pada tahun 2016 realisasi mencapai 100% yang berarti semua RS di Kabupaten Pati telah melakukan pelayanan gawat darurat. Tahun 2017 ini semua RS di Kabupaten Pati juga melakukan pelayanan gawat darurat dengan baik yaitu bisa dilihat dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasinya juga 100%.

### 2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Target indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin setiap tahunnya relatif sama yaitu 100% sampai akhir RPJMD dengan harapan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat terpenuhi dengan baik. Selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selalu mencapai target yang diinginkan yakni sebesar 100% dan masuk dalam kategori *sangat tinggi*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten

Pati dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin telah berhasil mencapai target akhir RPJMD 2017.

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui Jamkesda dan Jaminan Kesehatan Nasional meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan. Hal ini berarti terjadi peningkatan pemanfaatan di sarana rujukan dan sistem rujukan telah berjalan optimal dengan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dimana dalam kondisi gawat darurat dapat langsung dirujuk ke PPK II (RS) TA 2017.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menyerap anggaran sebesar Rp. 329,408,088,066 dari Rp. 355,267,117,200 Kinerjanya sangat tinggi dicapai dengan program-program sebagai berikut :

- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"
- Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

**7. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat**

Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat merupakan sasaran strategis yang masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 sebagai prioritas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 2 (dua) indikator dicapai rata-rata dalam kategori rendah.

**Tabel 3.18**  
**Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Cakupan desa siaga aktif	Persen	100	46.89	46.89
2. Persentase posyandu aktif	Persen	100	61	61
<b>Rata-Rata Capaian</b>				61

**Uraian Pencapaian Indikator:**

Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat merupakan sasaran strategis yang masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 sebagai prioritas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 2 (dua) indikator dicapai rata-rata dalam kategori rendah.

## 1. Desa Siaga Aktif

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari desa siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Adapun Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, dengan ciri:

- a) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya;
- b) Penduduknya mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kriteria Desa Siaga Aktif adalah Strata Desa Siaga Mandiri dan Purnama, sedangkan untuk strata desa siaga yang belum mandiri dan purnama maka bukan merupakan desa siaga aktif, hanya desa siaga saja. Berdasarkan pengertian diatas maka, di Kabupaten Pati dari seluruh total 406 desa terdapat 68 Siaga Aktif Mandiri, 122 desa aktif kategori Purnama, 158 desa kategori Madya dan 64 desa kategori Pratama. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan desa siaga aktif belum mencapai 100%, sehingga masih perlu peningkatan kategori menjadi Desa Siaga Aktif.

Grafik: 3.4

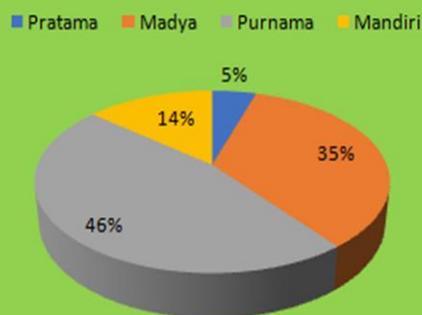


## 2. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar sehingga mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang merupakan tujuan utama dari posyandu. Sedangkan tujuan khusus posyandu yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan mendasar (*primary health care*), meningkatkan peran lintas sektor, dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan mendasar.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan posyandu iniantara lain frekuensi kunjungan (penimbangan) setiap bulan, namun tidak semua posyandu dapat berfungsi setiap bulan sehingga frekuensinya kurang dari 12 kali setahun. Posyandu dikatakan aktif, apabila frekuensi penimbangan di atas 8 kali setahun.

**Grafik: 3.5 POSYANDU MENURUT STRATA  
DI KABUPATEN PATI**



Indikator yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan posyandu ini antara lain frekuensi kunjungan (penimbangan) setiap bulan, namun tidak semua posyandu dapat berfungsi setiap bulan sehingga frekuensinya kurang dari 12 kali setahun. Posyandu dikatakan aktif, apabila frekuensi penimbangan di atas 8 kali setahun.

Posyandu yang terbentuk di Kabupaten Pati sampai tahun 2016 total adalah 1.604 terdiri dari Posyandu Pratama 77, Posyandu Madya 557, Posyandu Purnama 747 dan 223 Posyandu Mandiri. Namun yang aktif hanya 60.47% saja yaitu posyandu yang tergolong purnama dan mandiri dengan total 970 posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa persentase posyandu aktif di Kabupaten Pati sebesar 61% dan masuk dalam kategori *rendah*.

Desa yang dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM yang memiliki forum desa/kelurahan berjalan setiap bulan, memiliki 9 orang atau lebih kader pemberdayaan masyarakat/teknis, memiliki kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, memiliki posyandu dan 4 UKBM yang lain, dukungan dana untuk kegiatan kesehatan dari pemerintah desa/kelurahan masyarakat dan dunia, ada peran aktif masyarakat dan peran lebih dari 2 (dua) ormas, memiliki peraturan Kades/Kalur tentang desa siaga aktif dan sudah direalisasikan serta melakukan pembinaan PHBS minimal kurang dari 70% rumah tangga yang ada. Pelaksanaan desa siaga aktif telah membentuk 406 forum kesehatan desa, telah melatih 2.932 dari 6.358 kader kesehatan desa, juga melibatkan 1.267 tokoh masyarakat dan tokoh agama.

### **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran selama kurun waktu antara tahun 2014-2017 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih**  
**dan sehat di masyarakat**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
1. Cakupan desa siaga aktif (%)	46.89	46.89	46.89	46.89
2. Persentase posyandu aktif (%)	48	61	61	61

#### **1. Capaian Desa Siaga Aktif**

Sampai dengan akhir RPJMD ini baru mencapai 146.89%. Tidak terjadi peningkatan capaian kinerja Desa Siaga Aktif karena peningkatan target tanpa didukung pembiayaan untuk Desa Siaga Aktif dan pemberdayaan masyarakat. Padahal pembentukan dan kelangsungan kelembagaan Desa Siaga menjadi desa siaga aktif merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa sendiri. Hal inilah yang belum dirasakan sebagai kebutuhan dan dukungan pemerintah desa dan masyarakat.

## 2. Posyandu Aktif

Pada tahun 2016 masih terdapat 635 posyandu dalam kategori pratama dan madya, sehingga tidak digolongkan dalam posyandu aktif. Pada tahun 2017 ini juga masih sama belum ada peningkatan kategori posyandu. Yang digolongkan dalam posyandu aktif adalah yang masuk kategori purnama dan mandiri, sedangkan Posyandu Mandiri sendiri adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatannya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang kepesertaannya lebih dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.

Untuk Meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat anggaran Pemerintah Kabupaten Pati secara keseluruhan sebesar 16,067,621,100, tererap 90% atau 14,502,832,870, dengan program kegiatan;

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

### 3.2.3 Tujuan: “Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak”

Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati adalah meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Uraian dari pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

#### 8. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak

Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak menjadi prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 dalam prioritas peningkatan **keberdayaan** dan kesejahteraan masyarakat, dari 3 (tiga) indikator pengukurannya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati berkinerja *sangat tinggi* dengan rata-rata capaian 110.6%.

**Tabel 3.20**  
**Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak**

INDIKATOR	SATUAN	T	R	CAPAIAN
1. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	PERSEN	100	100	100
2. Partisipasi angkatan kerja perempuan	ANGKA	51,31	68,05	132
3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	PERSEN	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian</b>				110,6

**1. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun ke atas**

Dari jumlah perempuan usia 15 tahun ke atas, yaitu 58.987 jiwa semuanya termasuk kategori melek huruf (Data LPPD Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 2017). Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas tercapai 100%. Untuk mencapai indikator ini tidak menemui hambatan berarti karena derasnya informasi yang beredar membuka wawasan masyarakat untuk pentingnya melek huruf. Baik orang tua maupun anak-anak perempuan sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya melek huruf. Pada umumnya orangtua beranggapan bahwa dengan bisa membaca dan menulis akan berpengaruh pada kesempatan anak dalam memperoleh pekerjaan. Motif ekonomi tidak hanya mendominasi pemikiran orang tua agar anaknya melek huruf, tetapi pengaruh media seperti televisi dan *hand phone* membuat informasi pentingnya melek huruf diterima oleh masyarakat.

**2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 68,05% dari target 51,31%. Secara kinerja tercapai 132% menjadi bukti dari *impact* pemberdayaan perempuan dan PUG (Pengarusutamaan gender) yang digarap oleh dinas sosial kabupaten Pati melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja wanita dengan jumlah penduduk wanita dalam usia kerja. Dari target 51,31% tercapai 68,05%. Dari Jumlah angkatan kerja wanita 445.476 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita dalam usia kerja 654.631 orang. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal: (1) Adanya perubahan pandangan dan sikap dalam masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum pria dan wanita serta semakin disadari perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan, (2) Adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya (dan juga kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya) dengan penghasilannya sendiri, (3) Adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, (4) Makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita, misalnya tumbuhnya industri kerajinan tangan dan industri ringan lainnya.

**3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.**

Target kinerja penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tercapai 100%. Hal ini terwujud karena setiap aduan dari masyarakat bisa diakomodir oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

**Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2017 target yang telah dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
1. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%)	87	100	102	100
2. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	173	177	177	132
3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini. Berdasarkan tabel di atas, angka melek huruf di kabupaten Pati mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari target 100% pada tahun 2017 telah mencapai 100%. Jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya angka tersebut sama, kecuali pada tahun 2014 yaitu 87%. Pada tahun 2017 mempertahankan capaian pada dua tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 dan 2016.

Selama 3 (tiga) tahun angka melek huruf anak perempuan usia diatas 15 tahun trennya naik. Pada tahun 2014 dari target 98,37% telah terealisasi 85,70% (nilai persentase pencapaian 87,12%). Pada tahun 2015 dari target 99,50% telah terealisasi 99,98% (nilai persentase pencapaian 100%). Sedangkan pada tahun 2016 dari target 98,37% telah terealisasi 99,99% (nilai persentase pencapaian 102%).

Nilai prosentase target dan realisasi diperoleh dari pengukuran perbandingan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf dengan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun. Pada tahun 2014 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 79.006 dan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 92.193. Pada tahun 2015 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 92.176 dan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 92.191. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 92.209 dan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 92.221.

Pencapaian sebesar 99,98% pada tahun 2016 telah menunjukkan keberhasilan kinerja Kabupaten Pati, meskipun tidak ada peningkatan dari tahun 2015 dan target akhir RPJMD tercapai sebesar

Hambatan utama yang ada dalam pencapaian kinerja ini adalah kemiskinan. Meskipun demikian memperhatikan persentase pencapaian yang cukup signifikan memperlihatkan bahwa hambatan tersebut mampu diatasi. Solusi yang ada dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan peningkatan informasi dan edukasi ke masyarakat yang kurang mampu, melalui sosialisasi tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun non formal.

Pada tahun 2014 dari target 51,31 telah terealisasi 88,56% (nilai persentase pencapaian 172,60%). Pada tahun 2015 dari target 51,31 telah terealisasi 90,97% (nilai persentase pencapaian 177,29%). Pada tahun 2016 dari target 51,31% telah terealisasi 90,97% (nilai persentase pencapaian 177%).

Nilai persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan target dan realisasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan jumlah partisipasi jumlah angkatan kerja keseluruhan. Pada tahun 2014 terealisasi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 233.429 dan angka angkatan kerja perempuan adalah 263.570. Pada tahun 2015 terealisasi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 261.888 dan angka angkatan kerja perempuan adalah 287.888.

Sedangkan pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 261.888 dan angka angkatan kerja perempuan adalah 287.888.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir tren capaian kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami peningkatan. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan kinerja Kabupaten Pati pada tahun 2016, dimana terdapat selisih lebih sebesar 39,66% dari target akhir RPJMD. Meskipun telah menunjukkan keberhasilan, namun masih ditemui hambatan dalam pencapaian kinerja ini yaitu belum optimalnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan. Solusinya adalah peningkatan advokasi yang terus-menerus di kalangan *stakeholder* yang terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Di sisi sasarannya yaitu kaum perempuan juga perlu mendapat pemahaman tentang peningkatan peran perempuan di dunia kerja.

Pada tahun 2014 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai persentase pencapaian 100%). Pada tahun 2015 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai persentase pencapaian 100%). Dan pada tahun 2016 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai persentase pencapaian 100%).

Untuk Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak anggaran APBD-P yang disediakan sebesar Rp. 3.897.969.245, mampu terserap Rp. 3.897.969.245 (96%) digunakan untuk melaksanakan Program Keluarga Berencana, Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program pelayanan kontrasepsi, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Hambatan utama yang ada dalam pencapaian kinerja ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Solusinya adalah dengan memberikan edukasi dan informasi serta memberi ruang bagi pengaduan terhadap kasus-kasus kekerasan termasuk penyelesaian kasusnya terutama melalui jalur hukum.

### 3.2.4 Tujuan: “Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM untuk mendorong daya saing daerah”

Menguatnya kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM di Kabupaten Pati diharapkan menjadi daya dorong bagi Kabupaten Pati untuk bersaing dengan daerah-daerah lain.

## 9. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM

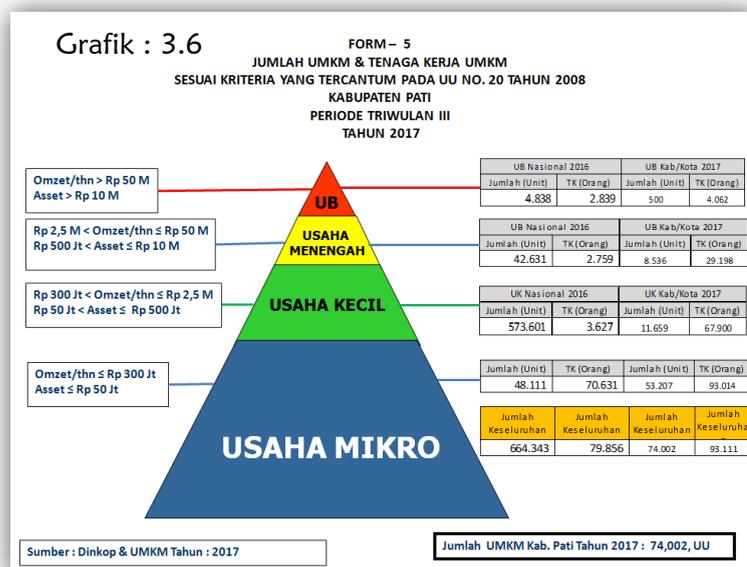
Pemerintah Kabupaten Pati sangat berhasil dalam meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM. Ada 2 (dua) Indikator kinerja utama yang digunakan yaitu persentase koperasi aktif dan persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UMKM.

Tabel 3.22  
Capaian Indikator

Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase koperasi aktif	Persen	100	52	52
2. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM	Persen	30	77	257
Rata-rata capaian				154,5

Terdapat 593 Koperasi aktif di Kabupaten Pati dari 1142 total koperasi atau 52% (limapuluh dua persen), Target pada RPJMD periode 2012 s.d. 2017 terlalu tinggi bahkan sempurna, mengingat Dinkop UMKM sebagai Pembina tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk mengatur koperasi, Pembinaan yg dilakukan Dinkop UMKM kurang fokus pada koperasi yg tidak patuh peraturan perundangan, misalnya koperasi yg tidak RAT belum mendapat pembinaan secara intensif dikarenakan keterbatasan SDM, Kepatuhan pada peraturan perundangan koperasi yg masih sangat lemah, terlebih pada *update* perkembangan peraturan perundangan, sebab Dinkop UMKM terbatas anggaran jika harus mengadakan sosialisasi setiap ada perubahan atau perkembangan peraturan perundangan yg harus dipatuhi.



Terdapat 53.227 usaha mikro dan kecil dari total 69.301 UMKM di Kabupaten Pati, dari Keberhasilan Bidang UMKM, Pertumbuhan Usaha Mikro yg begitu pesat membuktikan bahwa kinerja Dinkop UMKM dalam membina dan memberikan pelatihan efektif dan dapat diterapkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Pendampingan dalam hal kemitraan baik berupa permodalan maupun kerjasama dg pelaku usaha lain diwujudkan dg diselenggarakannya bazar UMKM sekaligus dalam rangka memperingati Hari Koperasi Tingkat Kabupaten Pati, Telah terbangunnya aplikasi SIMAGNUM yg bertujuan membangun *database* UMKM yg valid berdasar NIK dan perizinan yg dimiliki, sehingga kebijakan utk menentukan produk Usaha Mikro sebagai unggulan Kabupaten Pati lebih tepat sasaran.

Keberhasilan Bidang Koperasi, Penetapan SK Pembubaran Koperasi sebagai langkah nyata bahwa Dinkop UMKM telah melaksanakan peraturan perundangan, yaitu dengan mengusulkan koperasi yg selama tiga tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT dan menjalankan usahanya, Aplikasi SIKOPI yg telah berhasil dibangun pada website dinkopumkm.patikag.go.id diharapkan memberikan kemudahan dalam hal penyampaian laporan Triwulan dan pelaksanaan RAT sehingga Dinkop UMKM lebih efektif melakukan

pengawasan sekaligus pembinaan bagi koperasi yg berindikasi akan menjadi koperasi tidak aktif.

Hambatan Bidang UMKM *Database* yg disusun belum berdasar NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasar capaian kinerja dua indikator Dinkop UMKM dapat disimpulkan sangat kurang karena realisasi pada indikator koperasi aktif masih sangat jauh dari target, yaitu hanya 52% dari target 100% koperasi yg ada di Kabupaten Pati seharusnya koperasi aktif. Realisasi yg sangat jauh dari target merupakan akumulasi permasalahan ketidapatuhan koperasi untuk melaksanakana RAT dan menjalankan usahanya. Kegiatan Pengawasan yg selama ini dilaksanakan banyak terfokus pada mediasi pengaduan masyarakat, sehingga kepatuhan koperasi dalam hal penyampaian laporan Triwulan dan pelaksanaan RAT terbengkalai. Jika dari penyampaian laporan Triwulan dan laporan pelaksanaan RAT secara berkala selalu dipantau dg baik dan ketat, maka pembinaan lebih intensif bagi koperasi yang belum memenuhi kewajibannya bisa dijalankan dan tidak berakibat jumlah koperasi yg tidak aktif selalu meningkat dari tahun ke tahun.

### ***Evaluasi dan Analisis Kinerja***

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2017 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
1. Persentase koperasi aktif (%)	75	75	51	52
2. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM (%)	53	59	70	257

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Target tahun 2017 sebesar 100% dan hanya terealisasi sebesar 52% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 52% dengan kategori kurang.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Realisasi kinerja dari tahun 2014-2017 cenderung fluktuatif dengan realisasi tertinggi pada tahun 2014. Capaian kinerja tahun 2014-2017 cenderung fluktuatif, meski capaian kinerja tahun 2014 dan 2015 sama yaitu sebesar 75% namun tidak dapat bertahan dan turun selama dua tahun berturut-turut. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM di Bidang Pengawasan dan Penilaian untuk melakukan pengawasan efektif pada koperasi yang belum memahami penyusunan laporan triwulan dan kewajiban melaksanakan RAT. Lemahnya pengawasan berakibat pada pembinaan yang tidak tepat sasaran, selain kurangnya SDM pada Bidang Koperasi dibanding jumlah koperasi di Kabupaten Pati sebanyak 1.142 unit. Target akhir RPJMD sebesar 100% dan pada tahun 2017 hanya tercapai sebesar 52% berarti target tidak tercapai

Analisis-analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Keberhasilan pencapaian indikator ini karena adanya dukungan pembinaan dan pengawasan yang menitikberatkan pada kelembagaan koperasi dan bimbingan teknis yang dibutuhkan pengurus koperasi agar koperasi mampu menyusun laporan triwulan, melaksanakan RAT dan menjalankan kegiatan usahanya dengan baik

Kegagalan pencapaian target di akhir RPJMD tahun 2017 karena adanya pembubaran koperasi yang tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, Sumber Daya Manusia (SDM), SDM Aparatur dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati berjumlah 29 orang PNS dan 10 orang tenaga kontrak serta

tiga orang tenaga harian, meskipun sangat kurang SDM tapi selama ini dapat diberdayakan, Ketersediaan sarana dan prasarana meskipun belum lengkap tetapi dapat digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan,

Untuk Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar 1,855,210,000 sangat terbatas jika dibandingkan besarnya jumlah koperasi dan UKM di Kabupaten Pati, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Untuk menjabarkan dalam Program sebagai berikut:

- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

**3.2.5 Tujuan: “Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah”**

Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu meningkatnya produksi pertanian dan perikanan. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

**10. Meningkatnya produksi pertanian**

Sebagai prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2017 yaitu Prioritas Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Meningkatnya produksi pertanian dapat dikategorikan *sangat berhasil*, dari tiga indikator yang digunakan untuk mengukurnya semua dalam kategori berhasil dengan capaian rata-rata 111,56%

**Tabel 3.24**  
**Capaian Indikator Meningkatnya produksi pertanian**

	INDIKATOR	T	R	Capaian
1.	<b>Produksi tanaman pangan padi sawah (ton)</b>	576.669	641.601	111,30
2.	<b>Produksi tanaman pangan jagung (ton)</b>	128.630	168.376	130,90
3.	<b>Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar</b>	62,36	57,68	92,50
Rata-rata capaian				111,56

### ***Analisa Capaian Kinerja***

Target produksi tanaman pangan padi sawah adalah sebesar 576.669 ton Gabah Kering Giling (GKG). Berdasarkan data Angka Ramalan II (ARAM II) tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BPS Kab. Pati dan Kepala Dispertannak Kab. Pati, diketahui bahwa realisasi produksi padi sawah adalah sebesar 641.601 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau terjadi surplus sebesar 64.932 ton Gabah Kering Giling (GKG). Dengan demikian capaian produksi tanaman pangan padi sawah pada tahun 2017 adalah sebesar 111,30% dari target.

Adapun target produksi tanaman pangan jagung adalah sebesar 128.630 ton Pipilan Kering. Berdasarkan data Angka Ramalan II (ARAM II) tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BPS Kab. Pati dan Kepala Dispartan Kab. Pati, diketahui bahwa realisasi produksi jagung adalah sebesar 168.376 ton Pipilan Kering atau terjadi surplus sebesar 39.746 ton Pipilan Kering. Hal ini menunjukkan capaian produksi tanaman jagung pada tahun 2017 adalah sebesar 130,90% dari target.

Sedangkan target produktivitas padi per hektar adalah sebesar 62,36 kw/ha GKG. Berdasarkan data Angka Ramalan II (ARAM) tahun 2017, diketahui bahwa realisasi produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar adalah sebesar 57,68 kw/ha GKG. Hal ini menunjukkan capaian produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar pada tahun 2017 lebih kecil 4,68 kw/ha GKG dari target.

Pencapaian indikator kinerja Produksi Padi dan jagung diperoleh dengan cara mengalikan Produktivitas dan Luas Panen. Hasil yang diperoleh untuk produksi padi sebesar 641.601 ton GKG atau 111,30% dari target. Peningkatan produksi ini didukung dengan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat petani yaitu dengan menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo dan penyediaan sarana produksi yang memadai seperti benih bersubsidi, pupuk bersubsidi dengan penerapan pemupukan berimbang yang spesifik lokasi, serta tersedianya alat dan mesin pertanian yang memadai.

Produktivitas padi diperoleh dengan cara membagi produksi dan luas panen. Hasil yang diperoleh pada Tahun 2017 berdasarkan angka ARAM II sebesar 57,68 Ku/Ha atau 92,50% dari target. Tidak tercapainya target produktivitas ini dipengaruhi oleh suplai air dari waduk kedungombo yang ditutup mulai bulan Juli sampai dengan bulan November sehingga jadwal tanam mundur akibatnya panen juga mundur. Selain itu penurunan produktivitas disebabkan karena penggunaan pupuk yang tidak optimal akibat adanya alokasi pupuk bersubsidi yang tidak memenuhi kebutuhan, sementara untuk kekurangan pupuk petani jarang yang mau membeli sendiri.

Komoditas jagung mempunyai peran sangat strategis, baik dalam sistem ketahanan pangan maupun perannya sebagai penggerak roda ekonomi. Selain fungsinya sebagai bahan pangan, jagung juga berkontribusi terhadap ketersediaan protein karena jagung menjadi bahan baku pakan baik ternak maupun perikanan. Hasil yang diperoleh untuk produksi jagung sebesar 168.376 Ton atau 130,90% dari target. Peningkatan produksi ini dipengaruhi oleh iklim yang sangat mendukung, ketersediaan air cukup dan tingkat penerapan teknologi budidaya jagung hibrida berjalan sesuai harapan. Selain itu kegiatan pemicu dari anggaran APBN melalui dana Tugas Pembantuan turut serta menjadi pengungkit dengan kegiatan pengembangan jagung hibrida seluas 8.502 ha.

### ***Evaluasi dan Analisis Kinerja***

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.25**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya produksi pertanian**

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017
1.	Produksi tanaman pangan padi sawah (ton)	89	114	118	111
2.	Produksi tanaman pangan jagung (ton)	104	112	134	127
3.	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	94	101	96	92

Produksi padi Tahun 2014 sebesar 497.081 Ton (89%) disebabkan karena bencana banjir yang menggenangi lahan sawah yang ditanami padi selama 20 hari seluas 13.572 ha, terjadi di 315 lahan usaha kelompok tani pada 141 desa, 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati mengakibatkan rusak/puso seluas 11.868 ha. Bencana banjir mengakibatkan penurunan luas panen, produktivitas dan produksi sehingga kondisi pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015.

Produksi Padi tahun 2016 dibandingkan produksi tahun 2015 meningkat 31,38% (20.276 ton GKG) dan 8% (49.683 ton GKG) bila dibandingkan dengan target produksi tahun 2016. Hal ini disebabkan terjadinya penambahan luas areal panen 4,49% (4.916 ha) bila dibandingkan luas panen tahun 2015 (109.486 ha) dan 8,91% (9.360 ha) bila dibandingkan dengan target 2016, pada tahun 2016 curah hujan sangat tinggi sehingga Musim Tanam padi MT I dan MT II bisa maksimal dan didukung di MT III kondisi kemarau basah sehingga luas areal panen meningkat pada MT III yang biasanya tanam Palawija akan ditanam padi lagi karena air cukup. Hal ini didukung pula adanya kegiatan perbaikan jaringan irigasi serta perbaikan sarana dan prasarana irigasi lainnya. Apabila dilihat dari besarnya produktivitas padi (ASEM 2016) 58,25 kw/ha pencapaiannya 99,22% bila dibandingkan target produktivitasnya yaitu 58,71 kw/ha.

Produksi padi tahun 2017 tercapai 111% dari target akhir RPJMD didukung dengan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat antara lain dengan Sistem Tanam Jajar Legowo, Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu, fasilitasi alat mesin pertanian budidaya dan pasca panen dan fasilitasi benih.

Walaupun produktivitas padi pada akhir periode RPJMD ini tidak memenuhi target, tetapi produksi meningkat karena adanya penambahan luas panen.

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan Produksi dan Produktivitas Mulai Tahun 2014**

TAHUN	2014		2015		2016		2017	
	PADI	JAGUNG	PADI	JAGUNG	PADI	JAGUNG	PADI	JAGUNG
<b>KOMODITAS</b>								
<b>Luas panen (Ha)</b>	92.559	20.751	109.486	20.319	114.402	24.287,7	111.228	25.766,1
<b>Produktivitas (Kw/Ha)</b>	53,70	60,92	59,01	67,95	58,25	69,32	57,68	63,33
<b>Produksi (Ton)</b>	497.081	126.410	646.068	138.075	666.344	168.376	641.601	163.166

Produksi tanaman jagung tahun 2014 terjadi surplus 5.199 ton biji kering dan pada tahun 2015 terjadi surplus 14.440 ton biji kering. Surplus pada tahun 2014 dan 2015 merupakan dampak dari peningkatan produktivitas dengan penggunaan benih hibrida.

Produksi jagung Tahun 2016 (ASEM) dibandingkan dari target Tahun 2017 meningkat 14,63% (24.632 ton pipilan kering) dan bila dibandingkan Tahun 2015 meningkat 30.301 ton pipilan kering (21,94 %). Peningkatan ini karena terjadinya peningkatan baik produktivitas maupun luas panen jagung. Produktivitas jagung meningkat 1,65% (1,37 kw/ha); luas panen meningkat 3.930 ha (19,34%). Peningkatan ini disebabkan karena iklim yang sangat mendukung, air cukup dan tingkat penerapan teknologi budidaya jagung hibrida dengan program GP-PTT jagung dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga didukung dengan kegiatan pemicu peningkatan produktivitas yaitu kegiatan

pengembangan jagung hibrida APBN (Kementan) seluas 660 ha; Pengembangan jagung hibrida lahan khusus I : 1.200 ha dan jagung hibrida lahan khusus II : 2.075 ha serta jagung hibrida (APBD Prop. Jateng) seluas 200 ha.

Untuk Meningkatnya produksi pertanian, APBD Kabupaten Pati mengganggarkan Rp. 8.540.217.340 dengan serapan 92% atau Rp. 7.879.712.775 Kabupaten Pati, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dijabarkan dalam Program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

## 11. Meningkatnya produksi perikanan

Meningkatnya produksi perikanan merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 yaitu prioritas peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, ada 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.27**  
**Capaian Indikator**

**Meningkatnya produksi perikanan**

	INDIKATOR	SATUAN	T	R	CAPAIAN
1.	<b>Perikanan tangkap</b>	ton	44.637	26.864,14	60,18
2.	<b>Perikanan budidaya</b>	ton	43.350	42.509,65	98,06
				<b>Rata-rata</b>	<b>79.12</b>

### Uraian Capaian Kinerja

#### 1. Perikanan tangkap

Tahun 2017 ini terjadi penurunan produksi perikanan tangkap, dari 27.782 ton di tahun 2016 menjadi 26.864,14 ton di tahun 2017. Seperti tahun-tahun sebelumnya di tahun 2017 ini target produksi perikanan tangkap sebesar 44.637 ton.

Kegagalan capaian kinerja produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- (1) kelangsungan pengelolaan perikanan di laut pada tingkat eksploitasi tinggi (fully exploited);
- (2) faktor alam yang tidak dapat diprediksi, diantaranya: ketidakpastian cuaca, gelombang tinggi, kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST) dan perubahan arah angin;
- (3) biaya perbekalan yang tinggi termasuk naik turunnya harga bahan bakar mengakibatkan keterbatasan nelayan untuk melaut ke wilayah fishing ground yang baru; dan
- (4) keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, juga mengakibatkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan karena sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati masih menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut. Alat tangkap jenis ini yang banyak digunakan oleh Nelayan Kabupaten Pati adalah cantrang dan bundes.

- (5) khusus di perairan umum masih dijumpainya penangkapan dengan menggunakan bahan atau alat tidak ramah lingkungan seperti racun, setrum dan juga adanya bahan pencemar yang berasal dari limbah-limbah industri.

Adapun untuk keberhasilan di wilayah perikanan tangkap laut adalah dengan adanya peraturan tentang pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan menyebabkan masa beruaya (bertelur) ikan akan bertambah sehingga populasi ikan di wilayah jalur I semakin bertambah. Kondisi ini akan menguntungkan bagi nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

Upaya/strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan produksi perikanan tangkap diantaranya dengan:

- 1) mengganti kapal motor berskala kecil dan motor tempel dengan kapal motor besar yang berukuran > 30 GT dengan memfasilitasi akses perkreditan dari pihak ketiga sehingga operasi penangkapannya lebih luas, tidak terbatas pada perairan pantai saja akan tetapi bisa sampai di perairan lepas. Dengan area penangkapan yang lebih luas diharapkan hasil penangkapan ikan pun dapat meningkat;
- 2) sosialisasi yang lebih intensif atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 sehingga nelayan bisa memahami maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut;
- 3) peningkatan SDM bidang perikanan baik meliputi teknik penangkapan maupun upaya konservasi SDI sehingga keberlangsungan restocking ikan dapat terjaga;
- 4) Kemudahan akses perizinan bidang penangkapan ikan sehingga mempermudah legalitas sarana penangkapan ikan.

## **2. Perikanan budidaya**

Produksi perikanan budidaya dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan produksi budidaya dipengaruhi oleh kesadaran pembudidaya ikan yang selalu berinovasi terhadap jenis komoditas yang diminati pasar seperti ikan nila salin (ikan nila yang dibudidayakan di tambak), maupun ikan lele yang dipelihara dengan sistem terpal maupun kolam. Adapun untuk hambatan yang dialami adalah tingginya harga pakan yang berkualitas, padahal pakan merupakan komponen pokok dalam usaha budidaya baik ditambak maupun di kolam sehingga cost yang dikeluarkan dari pembudidaya ikan sangat tinggi.

Produksi perikanan di Kabupaten Pati sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga perlu pengembangan teknologi yang bisa memberikan jalan keluar agar ketergantungan kepada kondisi alam dapat teratasi. Adapun usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan produksi perikanan budidaya yaitu dengan memperbaiki daya dukung lahan, peningkatan Sumber Daya Manusia baik itu pelaku usaha perikanan maupun aparatur pemerintahnya salah satunya dengan memberikan pelatihan maupun pembinaan bagaimana cara membudidayakan ikan yang benar, menerapkan pola diversifikasi usaha (keberagaman jenis ikan yang dibudidayakan), intensifikasi (menambah jumlah ikan yang dibudidayakan) dan introduksi (membudidayakan ikan yang sebelumnya belum di budidaya di daerah tersebut).

### **Analisis capaian;**

Produksi perikanan Kabupaten Pati terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap berasal dari hasil tangkapan laut dan hasil

tangkapan di perairan umum, sedangkan untuk perikanan budidaya di Kabupaten Pati terdiri atas budidaya tambak, budidaya kolam.

Hasil capaian sasaran meningkatnya produksi perikanan baik itu yang berasal dari perikanan tangkap maupun budidaya dari tahun ke tahun belum bisa memenuhi target. Meskipun demikian volume perikanan baik tangkap maupun budidaya mempunyai pertumbuhan rata-rata yang positif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 21,74% untuk pertumbuhan rata-rata perikanan tangkap dan sebesar 5,25% untuk pertumbuhan rata-rata perikanan budidaya.

Realisasi produksi perikanan tangkap relatif naik dari tahun ke tahun kecuali untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,33%. Meskipun demikian nilainya mengalami kenaikan tiap tahunnya. nilai produksi sangat tergantung pada daya beli masyarakat. Semakin tinggi permintaan masyarakat terhadap ikan maka nilai ikan pun akan tinggi.

### **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Produksi perikanan budidaya dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya begitu juga dengan nilai jualnya relatif naik kecuali di tahun 2016 yang sedikit mengalami penurunan yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun sehingga berdampak ke harga jual ikan yang ikut turun.

Perbandingan:

**Tabel 3.28**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya produksi perikanan**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
1. Perikanan tangkap	38	62	63	60,18
2. Perikanan budidaya	90	93	99	98,06

### **Analisa Perbandingan:**

Dengan analisa perbandingan capaian realisasi dengan target daerah baik itu indikator perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun yaitu selama tahun 2014 sampai dengan 2017 indikator capaian belum bisa terealisasi 100% dimana perikanan tangkap pencapaian rata-rata selama 4 tahun hanya mencapai 55,80% dan perikanan budidaya mencapai 95,02%.

Untuk perikanan tangkap tingkat capaian indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan iklim, regulasi yang berlaku, restocking ikan dan ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan yang mendukung. Adapun untuk perikanan budidaya dalam penanganannya lebih terkontrol baik pengaturan pola tebar maupun ketersediaan benih ikan meskipun peran ketersediaan pakan sangat mempengaruhi usaha budidaya.

**Tabel 3.29**  
**Volume dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2014–2017**

NO	ASAL PRODUKSI	TAHUN				PENINGKATAN (%)
		2014	2015	2016	2017	
1	Perikanan Tangkap Laut					
	- Produksi ( kg )	16.143.036	26.710.118	27.654.878	26.734.289	(3,33)
	- Nilai (Rp.)	94.149.676.100	229.926.048.700	239.573.812.700	324.104.108.400	35,28
2	Perikanan Tangkap Perairan Umum					
	a. Waduk					
	- Produksi ( kg )	23.253	19.469	19.010	19.396	2,03
	- Nilai (Rp.)	202.616.500	208.284.000	203.338.000	207.448.000	2.02
	b. Sungai					
	- Produksi ( kg )	98.745	107.260	108.249	110.455	2,04
- Nilai (Rp.)	900.560.000	978.214.000	987.245.000	1.007.357.000	2.04	
3	Budidaya					

<b>a.</b>	Tambak					
	- Produksi (kg)	28.597.267	30.045.405	31.755.940	31.851.630	0,30
	- Nilai (Rp.)	477.551.738.000	526.233.092.000	503.875.470.000	623.122.662.000	23,67
			0	0		
<b>b.</b>	Kolam					
	- Produksi (kg)	7.909.623	9.145.376	10.257.690	10.658.020	3,90
	- Nilai (Rp.)	110.170.174.000	155.818.060.000	155.222.865.000	162.100.375.000	4,43
	Total					
	- Produksi ( kg )	52.771.924	66.027.628	69.819.007	69.373.790	(0,64)
	- Nilai (Rp.)	683.020.950.100	913.163.698.700	900.288.390.700	1.110.541.9450.400	23,35
		0	0	0	0	

Naik turunnya produksi perikanan di Kabupaten Pati, menandakan bahwa ketergantungan pada kondisi alam masih tinggi, sehingga perlu pengembangan teknologi yang bisa memberikan jalan keluar agar ketergantungan kepada kondisi alam dapat teratasi. Adapun usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan produksi perikanan budidaya yaitu dengan memperbaiki daya dukung lahan, peningkatan Sumber Daya Manusia baik itu pelaku usaha perikanan maupun aparatur pemerintahnya salah satunya dengan memberikan pelatihan maupun pembinaan bagaimana cara membudidayakan ikan yang benar, menerapkan pola diversifikasi usaha (keberagaman jenis ikan yang dibudidayakan), intensifikasi (menambah jumlah ikan yang yang dibudidayakan) dan introduksi (membudidayakan ikan yang sebelumnya belum di budidaya di daerah tersebut).

Meningkatnya produksi perikanan merupakan sasaran strategis yang didukung dengan anggaran Rp. 15.013.679.000 dengan serapan sebesar 98%. Atau Rp. 14.748.734.690 dengan melaksanakan program-program sebagai berikut;

- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- Program pengembangan perikanan tangkap
- Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

### 3.2.6 Tujuan: “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah”

Infrastruktur yang memadai akan menarik pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pati sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Pati. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya, meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air serta meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sarannya adalah sebagai berikut:

## 12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 yaitu prioritas peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan pengembangan wilayah. Ada 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.30**  
**Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan**

INDIKATOR	SATUAN	T	R	CAPAIAN
1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	PERSEN	65	73,51	113,09
2. Panjang jalan dilalui roda 4	KM	812,7	837,3	103,07
			<b>Rata-rata</b>	<b>108,08</b>

### *Uraian Pencapaian Indikator:*

**Tabel 3.31**  
**Jalan Kabupaten Pati**  
**Kondisi s/d Bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2017**

Jalan Kabupaten Pati Tahun 2017		
Total Panjang Jalan	: 837,377 Km	
Terdiri dari :		
a. Jalan Kabupaten	: 837,377 Km	
Dengan Kondisi Jalan		
1. Jalan Beraspal Baik	: 479,211 Km	57,23%
2. Jalan Beraspal Sedang	: 136,319 Km	16,28%
3. Jalan Beraspal Rusak Ringan	: 102,523 Km	12,24%
4. Jalan Beraspal Rusak Berat	: 119,324 Km	14,25%

\*Data dari Seksi Jalan Bidang Bina Marga DPU Kab. Pati 2017

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017. Indikator meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan adalah prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan panjang jalan yang dilalui roda empat. Dilihat dari target dan realisasi capaian masing-masing indikator menunjukkan adanya kenaikan. Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 73,51% dari target yang ditetapkan sebesar 65%. Sedang panjang jalan yang dilalui roda empat mencapai 837,377 Km dari target 812,7 Km.

Beban kendaraan yang melewati kelas jalan melebihi kapasitas, sehingga jalan cepat rusak, Pada beberapa wilayah stabilitas tanah kurang stabil, sehingga jalan bergelombang, Adanya genangan air di jalan pada musim penghujan, menyebabkan jalan banyak berlubang.

### **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014–2017 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.32**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan**

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	94	74	81	73,51
2.	Panjang jalan dilalui roda 4	101	105	103	103

**Analisa Perbandingan**

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, karena adanya penambahan jalan poros masuk jalan kabupaten. Di mana kondisi jalan poros banyak yang rusak/rusak berat, sehingga prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 94% menjadi 74%. Pada tahun 2016 prosentase mulai meningkat dari 74% menjadi 81%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali dari 81% menjadi 73,51% , karena ada penambahan jalan poros masuk jalan kabupaten.

Pada indikator panjang jalan dilalui roda 4 pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari 101% menjadi 105%. Untuk tahun 2016 mengalami penurunan, karena ada penambahan jalan poros masuk jalan kabupaten, yaitu dari 105% menjadi 103%. Tahun 2017 panjang jalan dilalui roda 4 tetap 103%, karena tidak ada penambahan panjang jalan.

Untuk mewujudkan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya dana yang dianggarkan pada APBD 2017 sebesar 15,74% dari belanja langsung yang terkait pencapaian sasaran atau Rp. 88.433.053.200 dan mendapat penambahan di APBDP hingga mencapai Rp. 156.000.255.850 dengan serapannya 99% atau Rp. 153.719.065.412 digunakan untuk melaksanakan program kegiatan antara lain; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program pembangunan infrastruktur perdesaan, Program pengaturan jasa usaha konstruksi.

**13. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi**

Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi di ukur dengan 2 indikator, yaitu rumah tangga bersanitasi capaian kinerjanya 97,89 persen, rumah tangga pengguna air bersih dicapai 87,48 dan menunjukkan bahwa kinerja kabupaten pati dalam meningkatkan ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi sangat berhasil.

**Tabel 3.33**  
**Capaian Indikator**  
**Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi**

INDIKATOR		T	R	KINERJA
1.	Rumah tangga bersanitasi (%)	95	93	97,89
2.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	85	74,36	87,48
Rata-rata				92,7

**Uraian Pencapaian Indikator:**

Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi merupakan sasaran strategis yang masuk dalam dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 yaitu prioritas peningkatan kesadaran pola hidup sehat masyarakat, ada 2

(dua) dua indikator untuk menilai kinerjanya, yaitu rumah tangga bersanitasi capaian kinerjanya 97,89 persen, rumah tangga pengguna air bersih capaian kinerjanya 87,48 persen. Dilihat dari capaian masing-masing indikator rata-rata mencapai 92,68 persen menunjukkan bahwa kinerja kabupaten Pati dalam meningkatkan ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi berhasil.

**Tabel 3.34**  
**Capaian Kinerja Layanan Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2017**  
**Di Kabupaten Pati**

JUMLAH PENDUDUK			CAPAIAN				CAPAIAN PENDUDUK YG MENGAKSES SANITASI (PERKOTAAN)				CAPAIAN PENDUDUK YG MENGAKSES SANITASI (PERDESAAN)				TOTAL KABUPATEN			
PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	AIR MINUM		SANITASI		AIR MINUM		SANITASI		PENDUDUK TERLAYAN AIR BERSIH	% PELAYANAN	PENDUDUK TERLAYAN SANITASI	% PELAYANAN				
			PENDUDUK TERLAYAN	% PELAYANAN	PENDUDUK TERLAYAN	% PELAYANAN	PENDUDUK TERLAYAN	% PELAYANAN	PENDUDUK TERLAYAN	% PELAYANAN								
			TARGET	330.556	85,00	377.222	97	653.796	75	806.712	63,99	945.463	75 %	1.197.586	95			
388.889	871.728	1.260.617	REALISASI	307.872	79,17	369.445	95	629.523	72,22	798.934	91,65	937.395	74,36	1.168.379	93			

\*Data dari seksi Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh

Prosentase penduduk Sanitasi Layak Kabupaten Pati Tahun 2017 adalah 93 % atau 1.168.379 jiwa dari total penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.260.617 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

Prosentase Rumah tangga pengguna air bersih Kabupaten Pati Tahun 2017 adalah 74,36 % atau 937.395 jiwa dari total penduduk 1.260.617 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 85 %.

Capaian saat ini bisa dikatakan cukup baik. Alasannya bahwa terdapat peningkatan layanan, dimana tahun 2014 capaiannya pada angka 69,35 % kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 74,36 %.

Hambatan yang dialami Swadaya/partisipasi masyarakat yg relatif rendah (kurang). Peran pemerintah desa belum(kurang optimal) contoh : ketentuan penyediaan minimal 10% dari anggaran desa untuk program PAMSIMAS terkesan hanya untuk memenuhi syarat formal dan belum disertai dengan pembahasan yang komprehensif di tingkat desa. Pengembangan paska pelaksanaan program / kegiatan penyediaan air bersih masih kurang. Masih dijumpai anggapan di masyarakat bahwa kebutuhan penyediaan air bersih merupakan semata-mata tugas dari pemerintah, bukan tugas/kewajiban masyarakat. Hambatan di tingkat Kabupaten terkait capaian Air Minum Sehat adalah masih dijumpai pembangunan Sarana Air Minum dan sanitasi di OPD yang baik belum terintegrasi dengan data.

Keberhasilan didukung oleh Pelayanan air bersih di desa meningkat ( peningkatan jumlah akses layanan air bersih), Masyarakat desa mulai mengenal dan melaksanakan tata kelola air bersih, Masyarakat di desa makin tahu dan paham tentang pembangunan sistem air bersih yang layak ( 4 K : Kualitas, Kontinuitas, kuantitas dan Keterjangkauan ), Peningkatan pemahaman dan praktek perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

**Tabel 3.35**  
**Pebandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi**

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017
1.	Rumah tangga bersanitasi (%)	90	61	90	97,89
2.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	17	76	76	87,48

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa Prosentase penduduk Sanitasi Layak Kabupaten Pati Tahun 2017 adalah 93 % atau 1.168.379 jiwa dari total penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.260.617 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 95 %. Tahun

2016 adalah sebanyak 92,7% atau 1.142.887 jiwa dari total penduduk kabupaten Pati sebanyak 1.239.988 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 87 % mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 36,89 %.

Untuk kondisi air bersih sampai dengan akhir tahun 2017 prosentase penduduk pengguna air bersih adalah 74,36 % atau 937.395 jiwa dari total penduduk 1.260.617 jiwa dari terget yang ditetapkan sebesar 85 % dengan capaian 87,48 % ada kenaikan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yaitu sebesar 11,48 %.

Program atau kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 yang mendukung Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitas adalah; Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dyang dianggarkan sebesar Rp. 17.411.224.150 menerima tambahan dalam APBD-P Rp. 37.573.222.250 terealisasi sebesar Rp. 36.364.872.487 atau 97%.

#### 14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 yaitu prioritas peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan pengembangan wilayah,ada 1 (satu) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.36**  
**Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	85	85	100

#### *Uraian Pencapaian Indikator:*

**Tabel 3.37**  
**Luas Saluran Irigasi yang ada di Kabupaten Pati**

Nama	Luas Baku	Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak
- Induk	59,703 Km	50,748 Km	2,985 Km	5,970 Km
- Sekunder	558,202 Km	474,472 Km	27,910 Km	55, 820 Km
- Pembuang	141,943 Km	120,652 Km	7,097 Km	14,194 Km
- Suplesi	6,654 Km	5,656 Km	0,333 Km	0,665 Km
- Gendong	7,840 Km	6,664 Km	0,392 Km	0,784 Km
- Tersier	1.078,440 Km	916,674 Km	53,922 Km	107,844 Km
<b>Jumlah</b>	<b>1.852,782 Km</b>	<b>1.574,865 Km</b>	<b>92,639 Km</b>	<b>185,278 Km</b>

Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik : 85%

*\*Data dari Seksi Pembangunan Pengairan Bidang SDA DPUTR Kab.Pati*

Meningkatnya kinerja jaringan irigasi merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahu 2017. Indikator untuk menilai kinerja jaringan irigasi salah satunya adalah kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 85 %. Jika kita berpedoman pada target kinerja jaringan irigasi dalam

kondisi baik yaitu 85 % maka kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan sarana jaringan irigasi dikatakan berhasil.

Hambatan yang dialami adalah Kondisi Daerah Aliran Sungai yang semakin kritis karena berbagai faktor multidimensi (kehutanan, permukiman, demografi), Peran masyarakat pertanian yang masih boros terhadap pemakaian air baku, Peran masyarakat yang belum optimal terhadap kondisi jaringan irigasi yang berimbas pada kehilangan air yang cukup besar, Minimnya wewenang Pemerintah Kabupaten terhadap penggunaan aset dalam hal pembangunan sumber-sumber air baru (embung, long storage, waduk dll), Pembangunan/rehabilitasi Jaringan irigasi yang belum terintegrasi dengan data yang akurat, Koordinasi yang belum terjalin antar institusi terkait Sumber Daya Air baik pusat, provinsi mau antar daerah.

Capaian berhasil karena didukung dengan Rehabilitasi jaringan irigasi sudah dilaksanakan rutin dengan dana meningkat, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) semakin eksis melakukan tata kelola air dalam suatu Daerah Irigasi, Munculnya sistem-sistem pertanian untuk menyesuaikan terbatasnya air irigasi (misal: System of Rice Intensification) Pendataan aset irigasi mulai dilaksanakan secara terpadu.

**Tabel 3.38**  
**Perbandingan Indikator**  
**Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi**  
**dan konservasi sumber daya air**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	76	101	99	100

Analisa Perbandingan:

Capaian tahun 2015 dan 2016 yang begitu tinggi hingga 99% tidak mungkin dicapai kembali karena menurunnya fungsi jaringan irigasi pada Daerah-daerah irigasi yang dengan areal layanan kecil (di bawah 20 ha), Daerah Irigasi kewenangan Pusat dan propinsi yang ada di Kabupaten Pati dan beberapa jaringan irigasi yang terkena bencana, maka target capaian 85 % pada tahun 2017 sangat realistis dicapai dengan pengoptimalan anggaran yang ada.

Program atau kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 yang mendukung Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air adalah; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program pembangunan turap/talud/bronjong, Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dianggarkan sebesar Rp. 35.016.386.000 menerima tambahan dalam APBD-P Rp. 57.890.893.500 terealisasi sebesar Rp. 57.443.779.379 atau 99%.

**15. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman**

Indikator dari perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas dapat dilihat dari penggunaan listrik oleh rumah tangga dan rumah yang layak huni, dari dua indikator ini Kinerja Kabupaten pati dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman sangat tinggi.

**Tabel 3.39**  
**Capaian Indikator**  
**Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rumah tangga pengguna listrik	Persen	97	99,48	103
2.	Rumah layak huni	Persen	96	91,44	95
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>95,5</b>

**Uraian Pencapaian Indikator:**

**1. Rumah tangga pengguna listrik.**

Realisasi kinerja dari indikator rumah tangga pengguna listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi kabupaten/kota di Kabupaten Pati, yang dapat dilihat dari tabel 3.41 berikut ini.

**Tabel 3.40**  
**Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Pati 2016**

No	Kab/Kota	Jml KK	Jml KK Berlistrik	Rasio Elektrifikasi Kab /Kota	Jml Dusun	Jml Dusun Belum Berlistrik	Jml Desa
1.	Pati	470.014	309.079	99,48	1.106	73	401

*Sumber: \*Data dari Seksi ESDM Bidang SDA & ESDM DPU Kab. Pati*

Persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan sebesar 97% terealisasi 99,48% atau tercapai 103%.

**2. Rumah layak huni.**

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar kepada warganya salah satunya papan/ tempat tinggal yang layak huni. Jumlah rumah tahun 2017 kabupaten Pati sebesar 371.378 unit, 91,44% rumah di Kabupaten Pati yang memenuhi kriteria layak huni atau sebesar 339.599 unit. Sesuai indikator SPM bidang perumahan rakyat cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah layak huni pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan sebesar 96 % terealisasi 91,44 % atau tercapai 95 %. Kabupaten Pati berhasil dalam mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan yang berkualitas.

**Tabel 3.41**  
**Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati**

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)
1.	Winong	22.559	18.394	2.016
2.	Pucakwangi	16.893	13.231	1.092
3.	Jakenan	17.636	15.508	1.832
4.	Jaken	16.047	13.794	4.317
5.	Juwana	30.830	24.765	1.988
6.	Batangan	16.096	13.673	1.147
7.	Wedarijaksa	22.194	17.902	1.119
8.	Trangkil	21.483	17.744	1.671
9.	Pati	32.161	27.827	802
10.	Sukolilo	31.326	25.323	2.327
11.	Gunungwungkal	11.971	10.793	644
12.	Tambakromo	19.187	15.422	2.145
13.	Tayu	24.720	18.980	1.033
14.	Margorejo	21.135	17.679	456
15.	Tlogowungu	18.940	15.305	1.355

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)
16.	Dukuhseti	20.015	17.990	1.557
17.	Margoyoso	23.194	19.284	1.881
18.	Kayen	29.623	21.878	3.482
19.	Gabus	21.957	18.172	1.299
20.	Cluwak	16.034	13.994	689
21.	Gembong	15.395	13.220	426
	JUMLAH	449.396	370.878	33.278

\*Data dari Seksi Permukiman dan Perumahan Bidang Cipta Karya dan Perumahan DPU Kab. Pati

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dilihat dari perkembangannya capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2017 yang telah dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.42**  
Perbandingan Capaian Indikator Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017
1. Rumah tangga pengguna listrik (%)	112	111	105	103
2. Rumah layak huni (%)	79	80	97	95

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa capaian kinerja Prosentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Pati Tahun 2017 adalah 103 % .Tahun 2016 adalah sebanyak 105 % .Tahun 2015 sebesar 111 %. Tahun 2014 sebesar 112 %.

Dari perbandingan capaian kinerja rumah tangga pengguna listrik mulai tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tinggi karena capaiannya masih diatas 100 %. Untuk kondisi rumah layak huni sampai dengan akhir tahun 2017 prosentase rumah layak huni adalah 91,44 % atau 339.599 unit dari total rumah 371.378 unit dari target yang ditetapkan sebesar 96 % dengan capaian 95 %. bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 ada kenaikan sebesar 16 %.

Hambatan yang dihadapi, Kurangnya komitmen baik dari pemerintah desa dan atau kelompok /pengurus penerima bantuan, Ketiadaan swadaya / keterbatasan swadaya penerima, karena bantuan sifatnya stimulan, Skema penyaluran bantuan yang berupa pengadaan langsung atau model kelompok Bantuan Keuangan Desa, Kalau kolompok pengurus bukan dari kelompok penerima, Pada prakteknya kelompok penerima seharusnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi yang menerima bantuan sebagian besar masyarakat miskin sehingga untuk mewujudkan swadaya sulit.

Adapun yang mendukung Keberhasilannya adalah; Komitmen pemerintah desa yang tinggi sehingga bisa memudahkan Kepala desa menggerakkan aparatnya untuk selalu melaksanakan pendampingan hingga pelaksanaan kegiatan, Mekanisme swakelola yang memaksimalkan potensi swadaya ( Contoh : program BSPS), Kesiapan swadaya masyarakat dan Pongorganisasian kelompok yang sangat baik, dimana semua pengurus dari kelompok penerima bantuan sehingga ada rasa kepedulian yang sangat tinggi.

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman anggaran APBD adalah 8.300.495.750 kemudian mengalami perubahan menjadi 8.908.684.450 terserap sebesar 8.525.124.074 atau 96%, program kegiatan yang dilaksanakan adalah; Program pengembangan perumahan, Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan Program pengembangan lingkungan sehat

### 3.2.7 Tujuan: “Meningkatnya peran pengusaha dan investor dalam kerjasama investasi”

Dalam upaya meningkatkan peran pengusaha dan investor dalam kerjasama investasi, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

#### 16. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi

Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi merupakan sasaran strategis yang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 yaitu prioritas peningkatan promosi dan kerjasama investasi, ada 2 (dua) indikator untuk menilai kinerjanya.

**Tabel 3.43**  
Capaian Sasaran  
Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi

INDIKATOR	PERSEN	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
1. Jumlah investor berskala nasional	PMDN/PMA	17	41	241
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional	M.rupiah	1.060	646	60
		<b>Rata-rata</b>		150,5

#### Uraian Pencapaian Indikator:

**Tabel 3.44**  
Data PMDN dan PMA Kabupaten Pati Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Negara	Jenis	Investasi (Dalam Rp. Juta)
1	PT. KERAJAAN ICE INDONESIA	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	Indonesia	PMDN	3.000
2	CV. JAVATECH AGRO PERSADA	Industri mesin pertanian dan kehutanan	Indonesia	PMDN	600
3	CV. JAVATECH AGRO PERSADA	Industri mesin pertanian dan kehutanan	Indonesia	PMDN	2.920
4	CV. ELEKTRIKA BERDIKARI	Konstruksi gedung	Indonesia	PMDN	2.640
5	PT. BUMI NUSANTARA POWER	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	Indonesia	PMDN	3.082,9
6	PT. KARYA ABADI TAYU	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor dan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	Indonesia	PMDN	6.800
7	CV. SUBUR MAKMUR SEJAHTERA	Produksi kompos sampah organik	Indonesia	PMDN	250
8	PT. DIOR ZACHARY JOY	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Indonesia	PMDN	500
9	PT. DIOR ZACHARY JOY	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Indonesia	PMDN	1.500
10	PT. TANESIA JAYA	Produksi es	Indonesia	PMDN	1.864,9
11	PT. DIOR ZACHARY JOY	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Indonesia	PMDN	500
12	PT. DIOR ZACHARY JOY	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Indonesia	PMDN	3.000

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Negara	Jenis	Investasi (Dalam Rp. Juta)
13	PT. HARTONO JAYA ANUGERAH MIGAS	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	Indonesia	PMDN	1.500
14	CV. ANUGRAH SINAR LAUT	Industri pengolahan garam	Indonesia	PMDN	2.515
15	PT. STARINDO JAYA PACKAGING	Industri karet, barang dari karet dan plastik	Indonesia	PMDN	24.500
16	PT. STARINDO JAYA PACKAGING	Industri karet, barang dari karet dan plastik	Indonesia	PMDN	79.500
17	PT. FARMER GUNANUSA ERAMANDIRI	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMA	13.418
18	PT. ARINDO UTAMA PERKASA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMA	504,52
19	PT. BULAN BARU INDONESIA	Jasa lainnya	Indonesia	PMA	13.418
20	CV. CDEF (CARLOS DAVIN EUNIS FELIX)	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	1.075
21	PT. DIHAN PRADUTA PERKASA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	1.500
22	CV. BERSATU MAJU PADU	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	750
23	CV. HERITA PANCA UTAMA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	600,5
24	PT. KRIDHA MULTI NIAGA PRIMA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	800
25	PT. SINAR UTAMA KARYA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	2.700
26	PT. CITRA KARYA LILA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	1.500
27	CV. BERKAH	Transportasi gundang dan telekomunikasi	Indonesia	PMDN	750
28	CV. KJ PHONE MULTI USAHA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	1.000
29	PT. MEKAR MULIA CONTRACTOR	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	8.000
30	KSU SYARI'AH HARAPAN UMAT	Jasa lainnya	Indonesia	PMDN	39.222,9
31	CV. PUTRA UTAMA PERKASA	Tanaman pangan dan perkebunan	Indonesia	PMDN	3.500
32	CV. SANTOSA JAYA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	682,8
33	PT. ARCONT DIKA	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	4.000
34	PT. MURIA PANGAN JAYA MAKMUR	Industri makanan	Indonesia	PMDN	8.105,5
35	UD. KALIAN	Industri makanan	Indonesia	PMDN	13.754,9
36	PT. PATI JAYA MOTOR	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	9.300
37	KUD SARONO MINO	Perdagangan dan reparasi	Indonesia	PMDN	9.460,6
38	PT. KRISNA BRASS INDONESIA	Industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik	Indonesia	PMDN	1.531,6
39	PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA	Industri makanan	Indonesia	PMDN	138.692,8
40	PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA	Industri makanan	Indonesia	PMDN	142.792,8
41	PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA	Industri makanan	Indonesia	PMDN	94.781,5
<b>Total</b>					<b>646.514,2</b>

Tahun 2017 minat pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pati cukup besar dengan target harapan investor masuk 17 investor dan teralisasi sebanyak 41 investor atau ada kenaikan menjadi 241% dari target awal, yang terdiri dari investor dalam negeri dan investor asing ( 38 unit PMDN dan 3 unit PMA).

Namun nilai realisasi investasi yang masuk belum dapat memenuhi target dan hanya mampu memenuhi 60% dari target yang diterapkan yaitu 1.060 M baru tercapai 646 M.

### ***Evaluasi dan Analisis Kinerja***

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2017 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.45**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	162%	136%	88%	241%
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (M.rupiah)	31%	467%	90%	60%

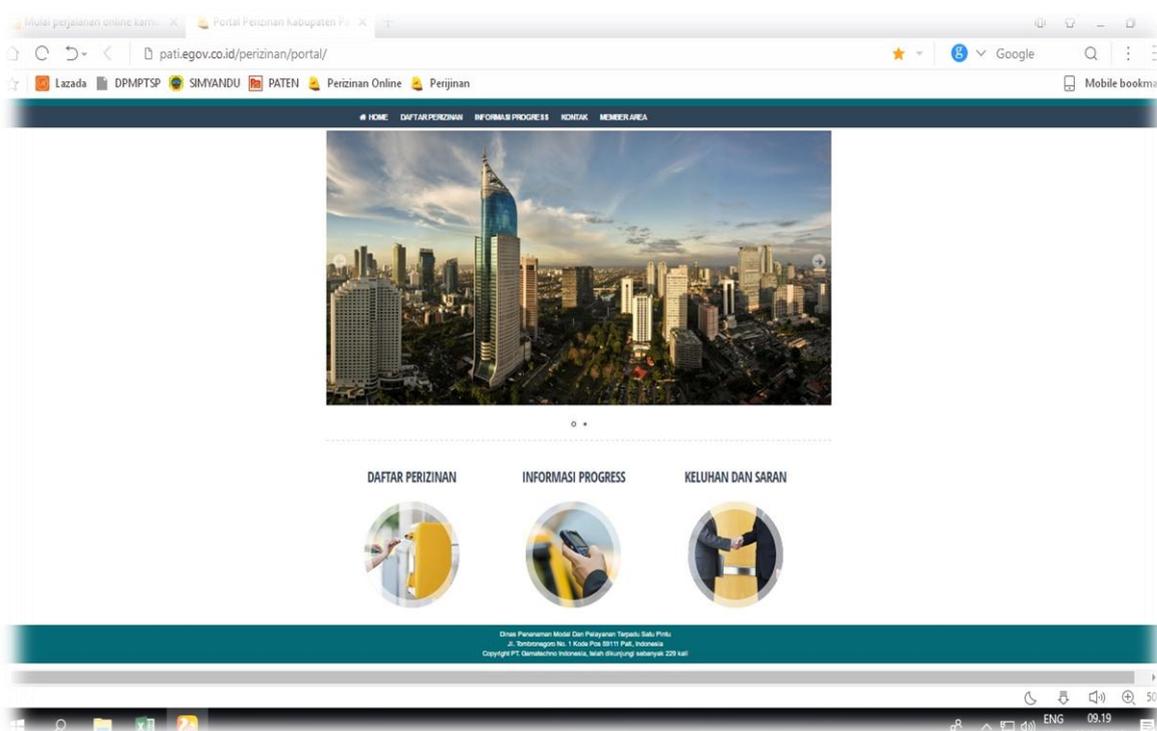
### Analisa Perbandingan:

Pada tahun 2014 capaian jumlah investor berskala nasional sebesar 162%. Pada tahun 2015 capaian jumlah investor berskala nasional sebesar 136%. Ini berarti persentase capaian mengalami penurunan sebesar 26% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 capaian jumlah investor yang masuk berskala nasional hanya mampu terpacai 88%, atau mengalami penurunan 48% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 capaian jumlah investor berskala nasional naik menjadi sebesar 241% ini berarti capaian jumlah investor berskala nasional mengalami kenaikan sebesar 153% dari tahun 2016.

Selama empat tahun terakhir, terjadi penurunan nilai investasi. Hal ini disebabkan karena Investor yang menanamkan modalnya tersebut tidak dapat kita prediksi, sehingga kita tidak bisa menargetkan nilai investasinya.

Meskipun pada tahun 2017 tidak mencapai target tahunan, namun kinerja cukup baik yaitu rata-rata 150,5% yang ditempuh dengan menjalankan Program peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi, Program Pengembangan Kemitraan, Program Penataan Struktur Industri dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Patihuhun 2017 menangani 42 perizinan dan nonperizinan. Untuk memudahkan dalam pelayanan dan pengelolaan data perizinan DPMPTSP Kabupaten Pati telah menggunakan aplikasi SIMYANDU yang dapat diakses melalui <http://pati.egov.co.id/perizinan>. Dari pelimpahan kewenangan sebanyak 42 perizinan tersebut, perizinan yang bisa diakses secara *online* sementara baru 4 (empat) izin, yaitu: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Masuk Kota (IMK).



Gambar :aplikasi simyandu

Direncanakan pada tahun 2018 aplikasi akan dikembangkan, sehingga dapat mempermudah/ mempercepat pelayanan pemohon izin untuk mengajukan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berkala akan menerapkan semua perizinan secara *online* dengan hanya memanfaatkan sistem pelayanan perizinan sudah dapat diakses dari manapun dan di manapun melalui *smartphone*.

**3.2.8 Tujuan: “Meningkatnya kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan”**

Dalam upaya meningkatkan kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja, meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS serta meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dirangkum dalam satu sasaran Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat,

**17. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.**

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kinerjanya rata-rata tercapai dalam kategori *Sangat tinggi*.

**Tabel 3.46**  
**Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
1. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	73,40	68,29	93,04
2. Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,60	3,89	141
3. PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	0,1	2,3	230
4. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja	Persen	83	86	104
			<b>Rata-rata</b>	142,01

Angkatan Kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja berumur 15 tahun keatas. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)* merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15+). Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pati tahun 2016, sebesar 69,03%, yang diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja sebesar 664.946 orang terhadap jumlah penduduk usia kerja sebesar 963.207 orang, artinya dari total jumlah penduduk yang termasuk usia kerja sebesar 69,03%, masuk sebagai angkatan kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian. Jadi hanya sekitar sepertiga dari penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja.

*Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja* pada tahun 2017 dengan target 73,40% terealisasi 68,29% atau capaian kinerja 93,04%, keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini tidak dapat 100% karena jumlah angkatan kerja lebih kecil dari yang ditargetkan dan peningkatan jumlah penduduk. Hal lain yang juga menyebabkan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari pekerjaan, kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi pola masyarakat seperti lebih memilih bekerja on line dengan memanfaatkan teknologi, tingkat pendidikan yang cenderung kurang terutama bagi masyarakat ekonomi miskin dan anak putus sekolah sehingga tidak mampu bekerja.

*Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)* mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur dari perbandingan

jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. TPT ini memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pati pada tahun 2017 sebesar 5,86%, diperoleh dari perbandingan antara jumlah pengangguran sebesar 38.939 orang terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 664.946 orang, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pati terdapat 5-6 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pati baik.

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial tercapai 2,3% lebih tinggi dari target 0,1%. Sebenarnya hal ini sangat tergantung dari anggaran yang tertuang dalam APBD. Semakin besar anggaran yang ada maka makin tinggi juga PMKS yang memperoleh bantuan. Jumlah PMKS yg diberikan bantuan (1.613 jiwa) dari total PMKS kabupaten pati yg seharusnya menerima bantuan (69.971 jiwa)

Indikator kinerja tahun 2017 dengan target 6,60% dan terealisasi 3,89% atau dengan capaian kinerja sebesar 141%. Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dengan berbagai cara untuk mempermudah pencari kerja mengakses lowongan pekerjaan antara lain dengan pelayanan prima bagi masyarakat yang mencari kelengkapan surat atau surat keterangan untuk mencari pekerjaan, pembebasan biaya dalam membuat surat keterangan pencari kerja (Kartu AK I) serta sistem yang cepat, tepat dan akurat dalam pelayanan prima kepada masyarakat.

Peningkatan kompetensi masyarakat / pencari kerja sehingga membuka peluang untuk bersaing di pasar kerja dan diterima bekerja, berusaha mandiri baik perorangan maupun kelompok.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. TPT ini memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pati pada tahun 2016 sebesar 5,86%, diperoleh dari perbandingan antara jumlah pengangguran sebesar 38.939 orang terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 664.946 orang, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pati terdapat 5-6 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pati baik.

### ***Evaluasi dan Analisis Kinerja***

Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2014-2017 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.47**  
**Perbandingan Capaian Indikator**  
**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**

INDIKATOR	2016	2017
5. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	94	95
6. Tingkat pengangguran terbuka (%)	113	141
7. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	600	230
8. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)	81	104

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini didominasi oleh laki-laki. Tahun 2014 TPAK sebesar 68,91 (persen), tahun 2015 naik menjadi 67,83% (persen), di tahun 2016 naik menjadi 68,05% (persen) serta pada tahun 2017 naik menjadi 68,29% (persen). Kondisi ini menggambarkan laki-laki merupakan kepala keluarga dan tulang punggung dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan perempuan dipengaruhi peran ganda mereka dalam rumah tangga. Perempuan cenderung keluar dari pekerjaan mereka setelah menikah, melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka kemudian mereka kembali ke dunia kerja ketika anak-anak mereka sudah besar. Kondisi ini dapat digambarkan bahwa pemerintah berhasil untuk menggalakkan wajib belajar 12 tahun bahkan mendorong mereka untuk dapat melanjutkan ke jenjang universitas dengan program-program pendidikan, sehingga untuk tahun 2017 relatif bisa ditekan untuk tidak masuk dunia kerja terlebih dahulu. Selain itu semakin terbukanya kesempatan pendidikan bagi perempuan di berbagai bidang akan diikuti oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Penurunan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi daerah yang agak lesu khususnya di sektor pertanian, listrik air dan gas serta perdagangan sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Kabupaten Pati.

Tingkat upah juga mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang berlawanan. Kenaikan tingkat upah disatu pihak akan meningkatkan pendapatan yang cenderung mengurangi tingkat partisipasi angkatan kerja. Di pihak lain peningkatan upah membuat harga waktu senggang relative lebih mahal, sehingga pekerjaan menjadi lebih menarik untuk menggantikan waktu senggang. Daya substitusi dari kenaikan upah akan mendorong kenaikan partisipasi kerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung menurun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Untuk tahun 2014 TPT sebesar 6,34% (persen) turun menjadi 4,43% (persen) di tahun 2015 dan berlanjut turun menjadi 4,12% (persen) pada tahun 2016 serta pada tahun 2017 menjadi 3,89 %. Disebabkan karena penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah dan perusahaan, adanya job market fair yang membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya untuk penyerapan tenaga kerja, job canvassing, bursa kerja online dan pengumuman lowongan kerja.

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial tercapai 2,3% lebih tinggi dari target 0,1%. Sebenarnya hal ini sangat tergantung dari anggaran yang tertuang dalam APBD. Semakin besar anggaran yang ada maka makin tinggi juga PMKS yang memperoleh bantuan.

Indikator Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja pada tahun 2017 dengan target 83 % terealisasi 86 % dari jumlah tenaga kerja 23.364 orang atau 20.364 tenaga kerja capaian kinerja 103,61%, dari target, keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini karena adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau BPJS Ketenagakerjaan.

**Tabel 3.48**  
**Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja**

URAIAN	2014	2015	2016	2017
Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja	86 20.364 tenaga kerja	78 17.890 tenaga kerja	67,13 17.222 tenaga kerja	86 20.364 tenaga kerja

Anggaran yang disediakan dalam APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 1,545,000,000,00 terserap sebesar 96% atau senilai Rp. 1,481,000,000,00, program yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja *sangat tinggi* ini adalah: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program pembinaan anak terlantar; Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan; Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa; Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Setelah APBD Perubahan total anggaran belanja berubah menjadi Rp. 2.874.124.008.000,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.800.690.540.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.073.433.468.000.

**Tabel 3.49**  
**Target Belanja Daerah APBD Perubahan**

Uraian	Target (Rp)	%
<b>Belanja Tidak langsung</b>	1.800.690.540.000	62,65%
<b>Belanja Langsung</b>	1.073.433.468.000	37,35%
<b>Total belanja</b>	2.874.124.008.000	100%

*Sumber: Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Pati, 2017*

Terdapat penambahan anggaran belanja untuk yang dipergunakan untuk membiayai pencapaian sasaran mengalami kenaikan 30% sebesar Rp. 169.256.045.090. dari APBD sebelum Perubahan.

Belanja langsung yang utama untuk program-program prioritas sebesar Rp. 742.017.606.250. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 95%, program/kegiatan di sasaran Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya dan sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air masing-masing tercapai (99%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran 4 Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk. (38%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.50**

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

No	SASARAN	ANGGARAN		Serapan	%
		APBD	APBD P		
1.	Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	9.170.781.000	9.293.152.000	9.164.901.440	99%
2.	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan	39.329.809.000	40.501.396.000	35.658.294.349	88%
3.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	195.996.000	270.996.000	266.153.900	98%
4.	Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk	1.981.343.025	1.891.906.025	1.677.288.813	89%
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	296.165.862.000	355.267.117.200	329.408.088.066	93%
6.	Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	15.857.968.100	16.067.621.100	14.502.832.870	90%
7.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.812.599.245	3.897.969.245	3.757.540.455	96%
8.	Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM	1.612.250.000	1.855.210.000	1.685.609.554	91%
9.	Meningkatnya produksi pertanian	7.458.011.000	8.540.217.340	7.879.712.775	92%
10.	Meningkatnya produksi perikanan	13.759.575.000	15.013.679.000	14.748.734.690	98%
11.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya	88.433.053.200	156.000.255.850	153.719.065.412	99%
12.	Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi	17.411.224.150	37.573.222.250	36.364.872.487	97%
13.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air	35.016.386.000	57.890.893.500	57.443.779.379	99%
14.	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	8.300.495.750	8.908.684.450	8.525.124.074	96%
15.	Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi	16.424.120.465	29.045.286.290	28.514.460.766	98%
16.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	6.800.150.770	7.789.031.170	7.087.368.090	91%
	<b>JUMLAH</b>	561.729.624.705	742.017.606.250	703.316.459.030	95%
				Rata-rata realisasi	95%
				Realisasi Tertinggi	99%
				Realisasi Terendah	88%

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran dengan target indikator yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati 2017 merujuk pada Rencana Strategis Kabupaten Pati 2012-2017 dalam mengelola kepercayaan masyarakat Kabupaten.

Banyak kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, faktor utama adalah perencanaan yang tidak akurat untuk mencapai target yang dicanangkan, reviu atas RPJMD 2012-2017 tidak dilaksanakan dimana target-target yang terdapat didalamnya banyak yang tidak realistis artinya terlalu besar dibanding dengan kemampuan baik dari segi SDM maupun anggaran, ada beberapa program dan dengan anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat terserap sehingga berdampak pada capaian kinerja yang ditargetkan, sebaliknya beberapa sasaran meskipun dari sisi anggaran tidak terserap atau serapannya kecil namun target kinerja dicapai dengan sangat berhasil ini menunjukkan bahwa sisi penganggaran yang kurang tepat dimana seharusnya dapat dialokasikan pada sasaran yang memang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk sampai dengan *outcome* yang dikehendaki.

Secara umum hal yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik oleh Pemerintah Kabupaten Pati kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Penegasan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Reviu atas dokumen perencanaan daerah dengan indikator yang jelas dan terukur sehingga dapat diterjemahkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kinerja individu sesuai dengan kondisi lapangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. Dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pengawasan dan monitoring secara periodik tentang capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, serta peningkatan kemampuan teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten sehingga dapat secepatnya dievaluasi kemudian dilakukan rencana aksi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- d. Membangun basis data di setiap SKPD sehingga proses perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan berhasil guna;
- e. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi

pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK);

- f. Pembangunan e-Sakip mutlak dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal, karena dengan adanya e-Sakip maka dapat diintegrasikan antara perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kinerja secara periodik dan berkala dengan data yang akurat dan *up to date*.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2017 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pati,           Maret 2018

BUPATI PATI,



**HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.**